



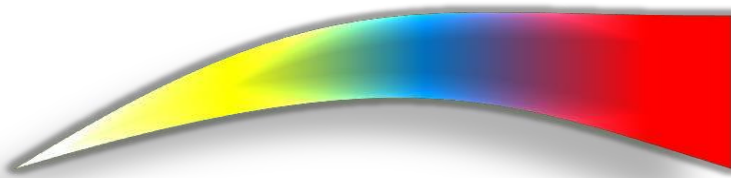
RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2022 - 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA





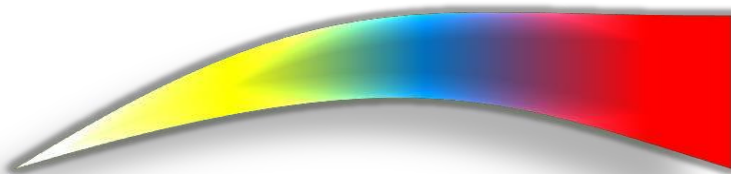
KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RESTR) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD) Tahun 2021-2026 adalah dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program Kegiatan pada Renstra ini mengacu pada Program Kegiatan yang menjadi Arah dan Kebijakan serta merupakan perencanaan implementasi dari Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Program dan Tujuan Bupati.

Rencana Strategis (RESTR) Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dan Indikator beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikator, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Strategis (RESTR) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara



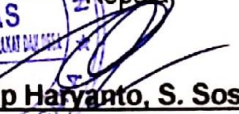
RENSTRA

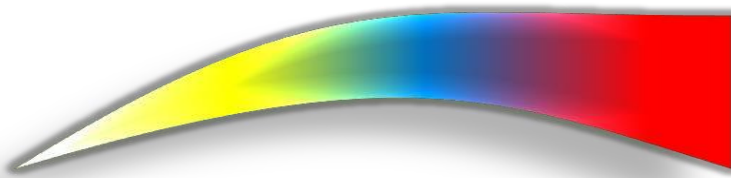
(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Melalui Rencana Strategis OPD periode 2021-2026 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan garis besar sasaran dan program/kegiatan yang direncanakan, dan semoga Program/Kegiatan yang disusun dan dilaksanakan nanti mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

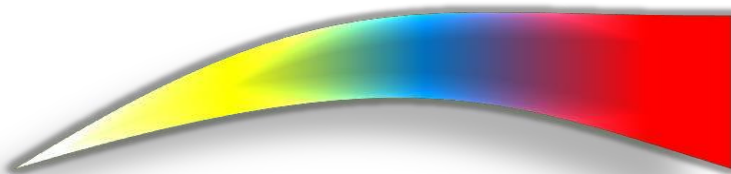
Tenggarong, Agustus 2021

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala

Dafip Haryanto, S. Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700924 199003 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iError! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II	11
GAMBARAN PELAYANAN SKPD	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35
BAB III	41
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..	43
3.3 Telaahan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	62

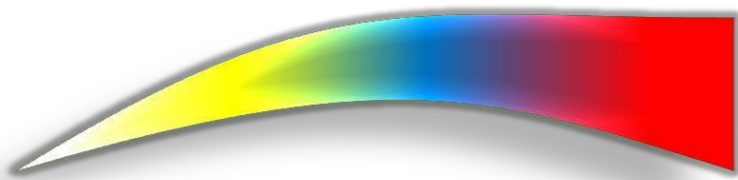


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

BAB IV	63
TUJUAN DAN SASARAN.....	63
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	63
BAB V	64
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI.....	67
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII	96
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
BAB VIII.....	119
PENUTUP	119



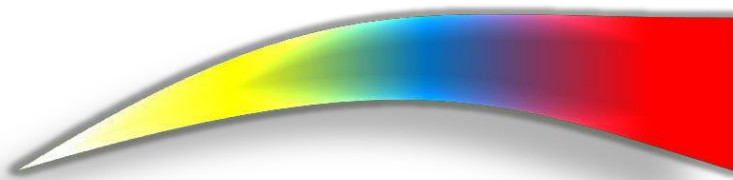
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat daerah yang terbentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Memberikan implikasi positif untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta pemberdayaan masyarakat dan desa, Pembagian urusan pemerintahan daerah, memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan antara pembangunan pada tingkat nasional dengan tingkat daerah dan pembangunan diwilayah perdesaan.

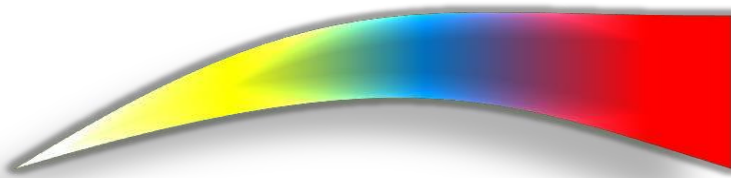


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah OPD yang mempunyai urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAB II Bagian Kedua Pasal 3 yang berbunyi “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga pasal 4 “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

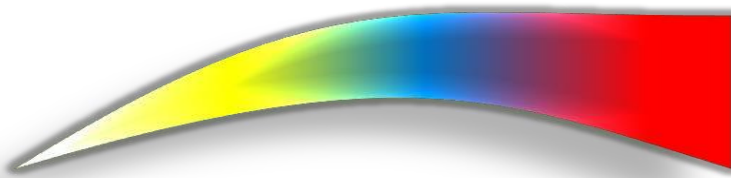
Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan



berpedoman RPJMD. Penyesuaian tersebut mutlak dilakukan karena sebelumnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelumnya disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 akan berakhir di tahun 2021.

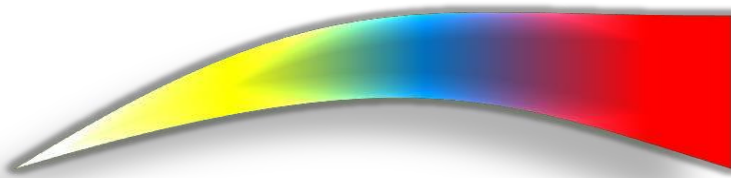
Renstra ini mendiskripsi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan serta capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dijadikan sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Bidang dan sub Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini sejatinya memerlukan keterlibatan dari beberapa OPD dan pihak yang terkait dan berkepentingan, baik dari internal maupun external organisasi. Kegiatan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini telah melakukan pembahasan secara intensif dengan semua perwakilan dari Bagian/Bidang dan masing-masing Sub Bagian/ Seksi yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keterlibatan semua pihak didalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi OPD untuk melaksanakan rencana strategis ini secara konsisten.

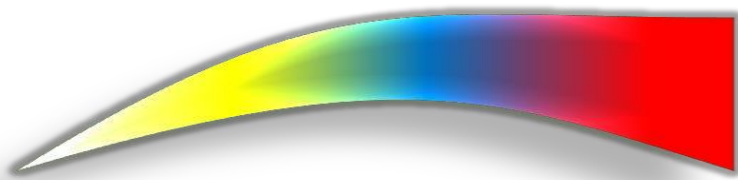


1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 ten-tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 ten-tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 ten-tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 ten-tang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Ta-hun 2005-

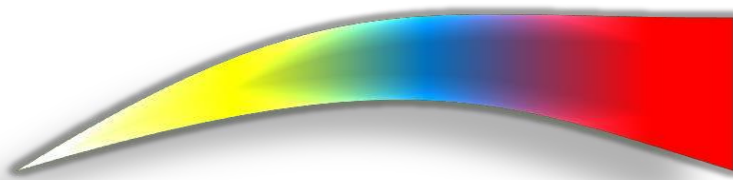


- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, ten-tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012

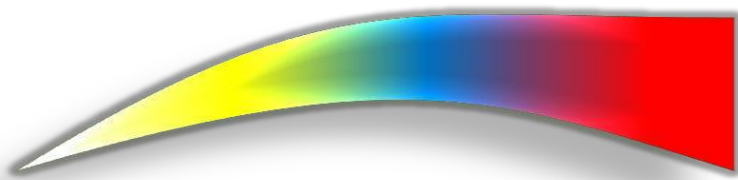


tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang



- Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; dan
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan mndagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Perda Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau program kerja tahunan dan lima tahunan, serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

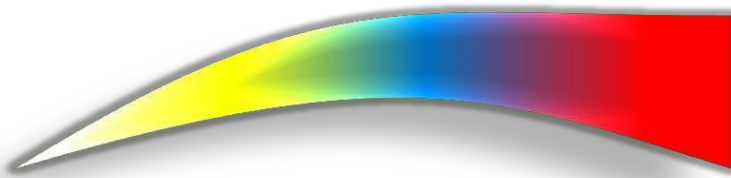
1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dan melayani;
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten-tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Review Rencana Strategis Dinas

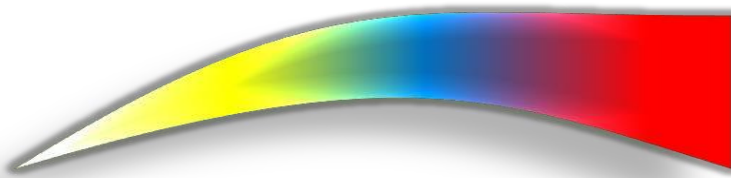


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki terkait dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

Bab III : Permasalahan dan isu-isu Strategis Perangkat Daerah yang berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih melalui RPJMD sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (1) Identifikasi



permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD (2). Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih, (3). Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, (4). Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (5) Penentuan Isu-isu Strategis antara lain : a. Gambaran Pelayanan OPD, b. Sasaran Jangka menengah Renstra OPD, c. Sasaran jangka Menengah provinsi/Kabupaten. d. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD, e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan OPD.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

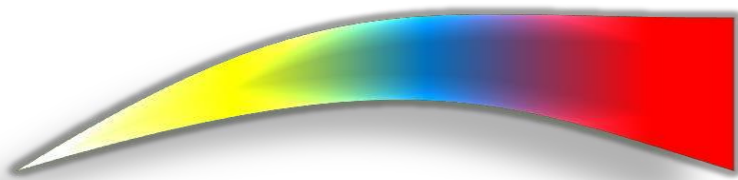
Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berisi program kerja dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang berisi indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : Penutup, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Lampiran-lampiran.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai :

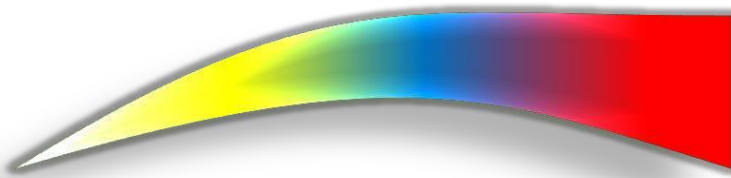
2.1.1 Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

2.1.2 Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

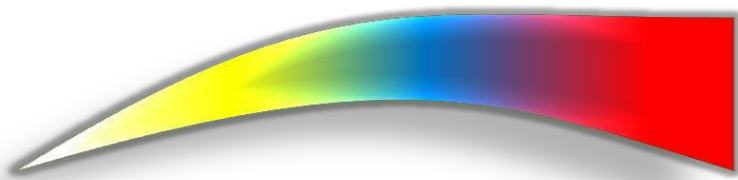


- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - 1) Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan, Keuangan Dan Aset Desa;
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Dan Perkembangan Desa;
 - 3) Seksi Kerjasama Desa.
- d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelembagaan Dan Pengembangan Bumdesa;
 - 2) Seksi Pengembangan Pasar Desa Dan Jaringan Pemasaran;
 - 3) Seksi Tata Kelola Ekonomi, Permodalan Dan Pengembangan Kewirausahaan;



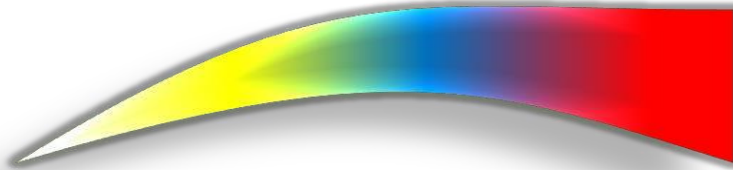
e. Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam Dan TTG, membawahkan:

- 1) Seksi Sumber Daya Alam, Rehabilitasi Dan Konservasi Lingkungan;
- 2) Seksi Pengembangan Dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- 3) Seksi Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Prasarana;

f. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Adat, membawahkan:

- 1) Seksi Kelembagaan, Adat Istiadat, Perencanaan Dan Pembangunan Partisipatif;
- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
- 3) Seksi Pengembangan Akses Informasi Dan Ketahanan Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

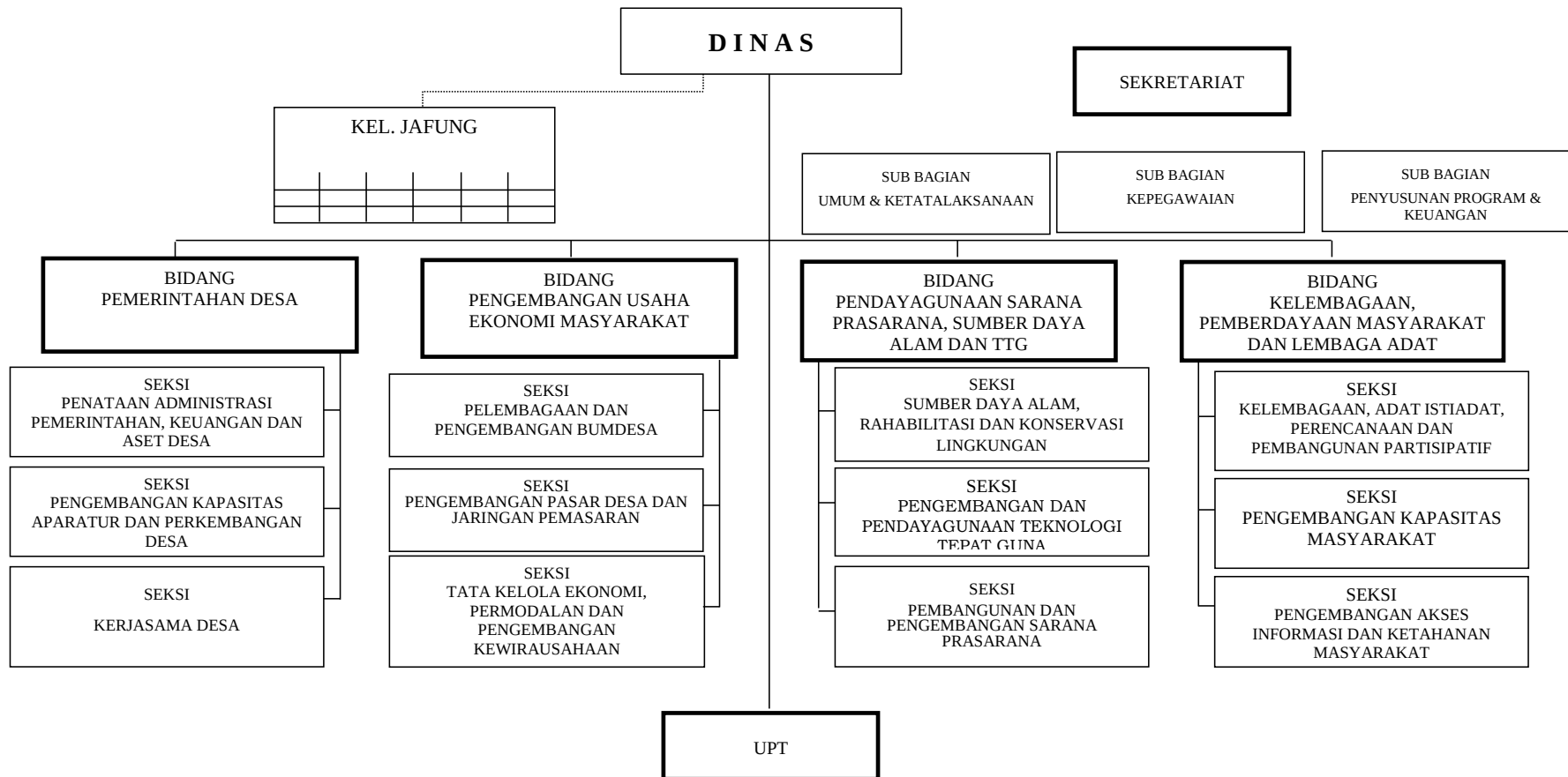


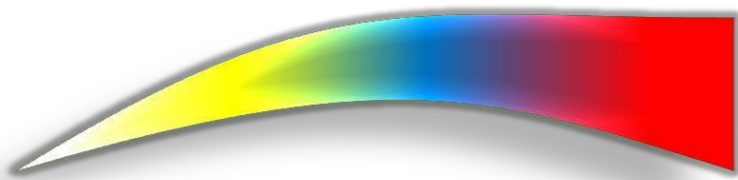
RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE A





Kedudukan,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

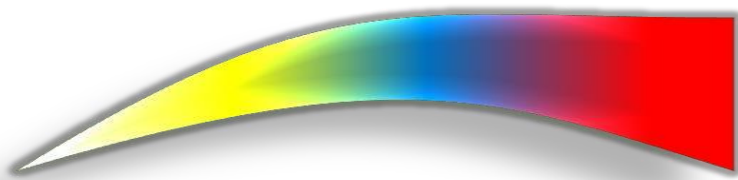
2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan status kepegawaian dan sub unit kerja dapat dilihat dalam Tabel 2.2. berikut ini;

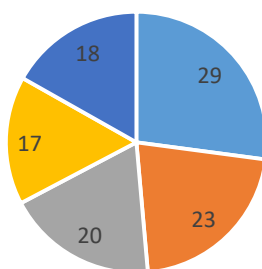
Tabel 2.2.1
Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MENURUT TEMPAT/BIDANG TUGAS

No	Bidang Kerja	Jumlah (orang)	%
1	Sekretariat	2	27%
2	Bidang Pemerintahan Desa	2	21%
3	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	16%
4	Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG	1	16%
5	Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat	1	17%
Jumlah		1	100%



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



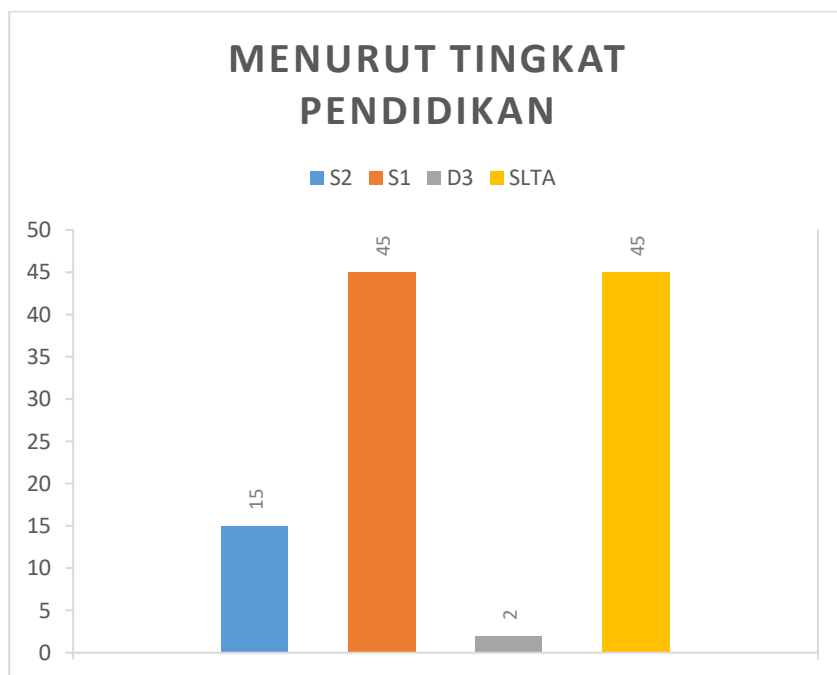
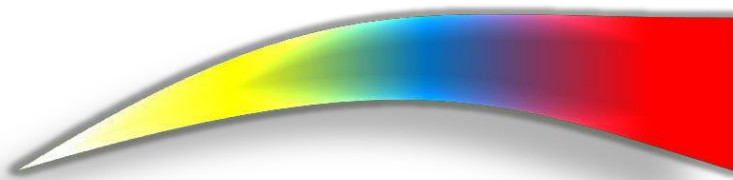
- Sekretariat
- Bidang Pemerintahan Desa
- Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG
- Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat

**Tabel
2.2.2**

Distribusi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

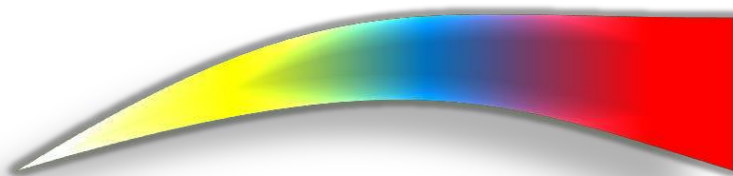
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase
1	S2	15	14%
2	S1	45	42%
3	D3	2	2%
4	SLTA	45	42%
Jumlah		107	100%



Menurut Golongan/Ruang

No	Pangkat/Golongan.Ruang	Jumlah (orang)	Prosentase
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1 %
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	1 %
3	Pembina (IV/a)	8	7 %
4	Penata Tingkat I (III/d)	32	30 %
5	Penata (III/c)	4	4 %
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	15	14 %



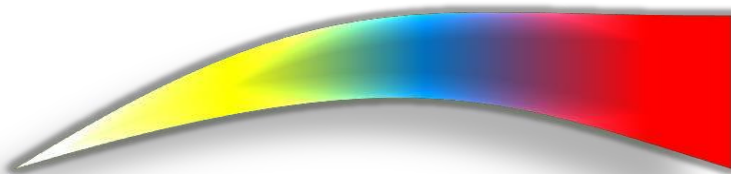
7	Penata Muda (III/a)	10	9 %
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	28	26 %

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki jumlah total pegawai 107 orang, yang terdiri atas 62 Orang laki – laki dan 45 Orang perempuan dengan rentang pendidikan paling rendah SLTA/Sederajat dan Paling Tinggi Strata Dua (S2).

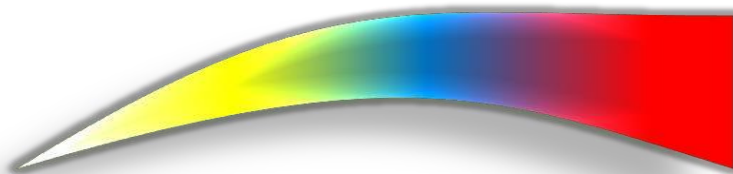
Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tabel 2.2.4

Daftar Inventaris Barang dan Aset

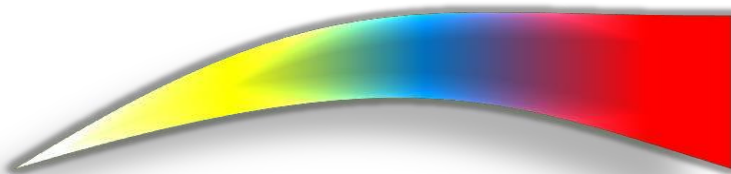
NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK BERAT	UNIT
1	Staion Wagon	7	7	0	Unit
2	Jeep	2	2	0	Unit
3	Sepeda Motor	49	49	0	Unit
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	0	Unit
5	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	1	0	unit
6	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	1	0	unit
7	Lemari kayu	2	2	0	unit
8	Perkakas Kantor	2	1	1	unit
9	Sofa	1	1	0	unit



NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK BERAT	UNIT
10	Lemari Es	1	1	0	unit
11	AC Unit	14	13	1	unit
12	Alat Dapur Lainnya	1	1	0	unit
13	Tustel	12	4	12	unit
14	Handy Cam	13	7	6	unit
15	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2	0	unit
16	P.C Unit	43	43	0	unit
17	Lap Top	61	61	0	unit
18	Note Book	51	31	20	unit
19	Printer	49	45	4	unit
20	Monitor	8	7	1	unit
21	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	37	37	0	unit
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	77	77	0	unit
23	Proyektor + Attachment	13	13	0	unit
24	Unintemuptible Power Supply (UPS)	17	16	1	unit
25	Handphone	13	3	10	unit
26	Meja Kerja	45	45	0	unit
27	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lain- lain	2	1	1	unit
28	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	1	1	0	unit



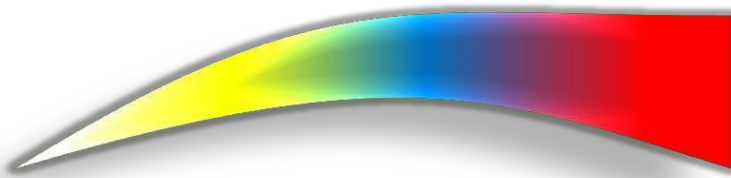
NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK BERAT	UNIT
29	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	1	0	unit
30	Kipas Angin	0	0	0	unit
31	CPU	5	5	0	unit
32	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	12	12	0	unit
33	Peralatan studio Visual Lain-lain	5	5	0	unit
34	Telephone Mobile	3	0	3	unit
35	PLTA Lain-lain	1	0	1	unit
36	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	13	0	13	unit
37	Kursi Putar	7	7	0	unit
38	Meja Komputer	6	6	0	unit
39	Camera Video	1	0	1	unit
40	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	41	41	0	unit
41	Personal Komputer	9	9	0	unit
42	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	5	5	0	unit
43	Band Kas	1	1	0	unit
44	Kursi Lipat	258	233	25	unit
45	Wireless	2	2	0	unit
46	Server	2	2	0	unit
47	Modem	2	2	0	unit



NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK BERAT	UNIT
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	2	0	unit
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	2	0	unit
50	Layar	3	3	0	unit
51	Filling Besi/Metal	5	5	0	unit
52	Router	8	8	0	unit
53	Peralatan Jaringan Lain-lain	16	16	0	unit
54	Pick Up	1	1	0	unit
55	Scanner	1	1	0	unit
56	Alat Penghancur Kertas	6	6	0	unit
57	Loudspeaker	3	2	1	unit
58	Dispenser	2	2	0	unit
59	Camera + Attachment	1	1	0	unit
60	Facsimile	2	2	0	unit
61	Mesin Absensi	2	2	0	unit
62	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	6	6	0	unit
63	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1	1	0	unit
64	Slide Projector	1	1	0	unit
	JUMLAH BARANG	946	862	84	UNIT

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara

2.3 Kinerja SKPD

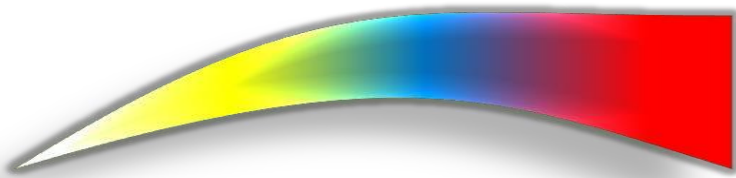


Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa untuk meningkatkan kinerjanya selain mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pelaksanaan program kegiatan sesuai prosedur kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan semua aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan sebagai Dinas koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu bekerja sama dengan berbagai sektor/ lintas sektor serta mampu menunjukkan kinerja pelayanan dan meningkatkan pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.

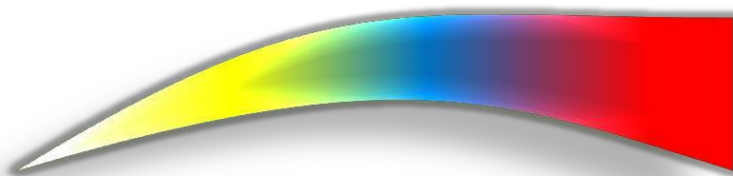
2.3.1 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Kesejahteraan Masyarakat. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah PKK .

Kelompok binaan PKK adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh PKK sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam

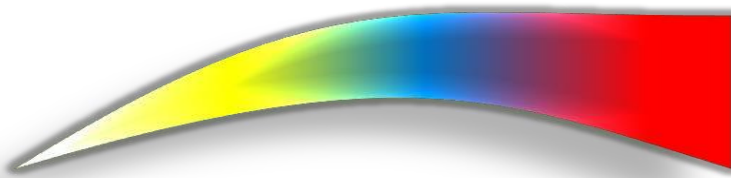


mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut :



Banyaknya PKK Menurut Kecamatan se kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA DAN KEL.	JUMLAH PKK			JUMLAH
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	
1	Muara Muntai	13	-	1	13	14
2	Loa Kulu	15	-	1	15	16
3	Muara Jawa	8	-	1	8	9
4	Samboja	23	-	1	23	24
5	Sanga-Sanga	5	-	1	5	6
6	Loa Janan	8	-	1	8	9
7	Muara Badak	13	-	1	13	14
8	Marangkayu	11	-	1	11	12
9	Tenggarong	14	1	1	14	15
10	Tgr Seberang	18	-	1	18	19
11	Sebulu	14	-	1	14	15
12	Muara Kaman	20	-	1	20	21
13	Kota Bangun	21	-	1	21	22
14	Muara Wis	7	-	1	7	8
15	Kenohan	9	-	1	9	10
16	Kembang Janggut	11	-	1	11	12
17	Tabang	19	-	1	19	20
18	Anggana	8	-	1	8	9
	JUMLAH	237	1	18	237	256

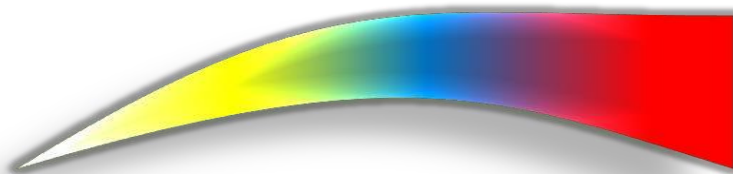


Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Binaan PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK aktif}} \times 100 \%$$

2.3.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pos Layanan Terpadu (Posyandu)

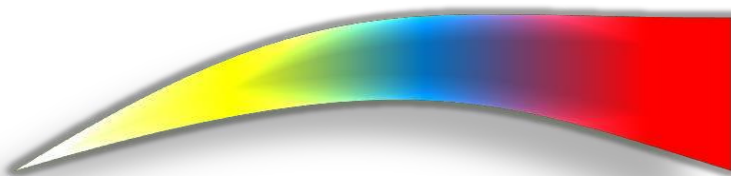
Pos layanan terpadu (Posyandu) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Kesehatan Ibu dan Anak . Rata-rata jumlah kelompok binaan Posyandu adalah banyaknya kelompok binaan Posyandu dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah Posyandu. Kelompok binaan Posyandu adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh Posyandu sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya hasilnya sajikan dalam tabel sebagai berikut :



**Banyaknya Posyandu Menurut Kecamatan Se Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2021**

**REKAPITULASI DATA JUMLAH POSYANDU TAHUN 2021
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELU	JUMLAH POSYANDU	AKTIF	TIDAK AKTIF	KET
1	Muara Muntai	13	30	√	-	
2	Loa Kulu	15	45	√	-	
3	Muara Jawa	8	36	√	-	
4	Samboja	23	82	√	-	
5	Sangasanga	5	30	√	-	
6	Loa Janan	8	68	√	-	
7	Muara Badak	13	55	√	-	
8	Marang Kayu	11	37	√	-	
9	Tenggarong	14	95	√	-	
10	Tenggarong Seberang	18	65	√	-	
11	Sebulu	14	45	√	-	
12	Muara Kaman	20	43	√	-	
13	Kota Bangun	21	59	√	-	
14	Muara Wis	7	17	√	-	
15	Kenohan	9	21	√	-	

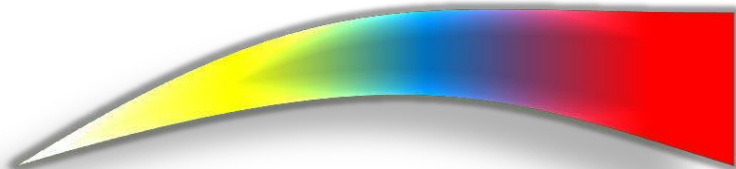


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELU	JUMLAH POSYANDU	AKTIF	TIDAK AKTIF	KET
16	Kembang Janggut	11	20	√	-	
17	Tabang	19	19	√	-	
18	Anggana	8	26	√	-	
JUMLAH		237	793			



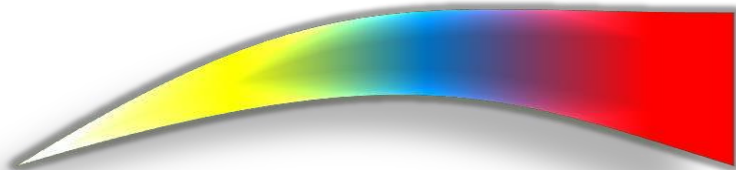
RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pembersayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (2021-2026)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Efektifitas dan efesiensi kerja aparatur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		100	100	100	100	100	36,25	45,26	12,62	15,66		36,25	45,26	12,62	15,66	
2	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Efektifitas dan efesiensi kerja aparatur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		100	100	100	100	100	3,26	0,37	4,23	7,01		3,26	0,37	4,23	7,01	
3	Cakupan Penataan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa		Jumlah desa yang tertib administrasi		100	100	100	100	100	28	4,01	11,58	20,64		28,00	4,01	11,58	20,64	
4	Cakupan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah desa yang tertib administrasi		100	100	100	100	100	0	0	0	0		-	-	-	-	

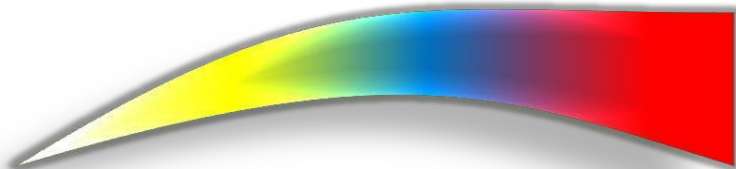


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
5	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Jumlah Kepala Desa yang dibina		100	100	100	100	100	78,64	86,94	25,55	6,74		78,64	86,94	25,55	6,74	
			Jumlah Sekretaris Desa Aparatur desa yang dibina																
			Jumlah Perangkat Desa Aparatur desa yang dibina																
6	Cakupan Kerjasama dan Tertatanya Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa		Jumlah Kepala Desa yang dibina		100	100	100	100	100	41,11	0	18,31	15,66		41,11	-	18,31	15,66	
			Jumlah Anggota BPD yang dibina																
7	Cakupan Jumlah Pembentukan, Pelembagaan, Pengembangan Pembinaan dan Pengelolaan BUMdesa				100	100	100	100	100	86,93	0	11,34	2,48		86,93	-	11,34	2,48	
8	Cakupan Perkembangan Pasar Desa				100	100	100	100	100	86,93	0	11,34	2,48		86,93	-	11,34	2,48	
9	Cakupan Pengembangan		Jumlah BUMDesa		100	100	100	100	100	86,93	0	11,34	2,48		86,93	-	11,34	2,48	

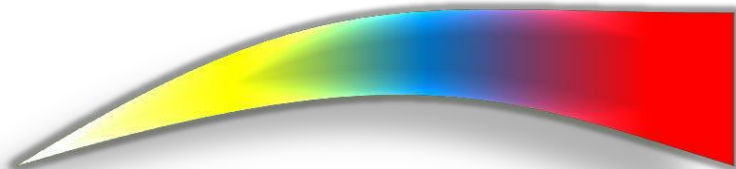


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kewirausahaan Masyarakat		Jumlah Usaha Kecil dan Menengah																
10	Cakupan Peran Perempuan di Pedesaan dalam Usaha Produktif		Jumlah UKM		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	Cakupan Jumlah Potensi dan Pemanfaatan SDA				100	100	100	100	100	29,71	0	21,76	3,7		29,71	-	21,76	3,70	
12	Cakupan Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Pemanfaatan TTG		100	100	100	100	100	29,71	0	21,76	3,7		29,71	-	21,76	3,70	
13	Cakupan Jumlah Fasilitas Sarana Prasarana		Jumlah fasilitas sarana prasarana		100	100	100	100	100	38,5	3,8	1,22	5,48		38,50	3,80	1,22	5,48	
14	Cakupan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Aktif		Jumlah LPM		100	100	100	100	100	41,11	0	18,31	15,66		41,11	-	18,31	15,66	
			Jumlah Lembaga Adat																
			Jumlah Karang Taruna																
			Jumlah RT																
15	Cakupan		Jumlah PKK		100	100	100	100	100	98,13	7,75	0	0		98,13	7,75	-	-	

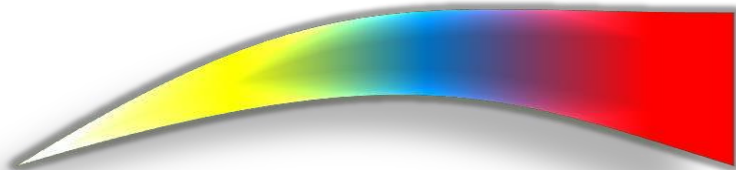


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Sumberdaya Masyarakat yang Profesional		aktif																
			Jumlah Posyandu aktif																
16	Cakupan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Akses Informasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0						



RENSTRA

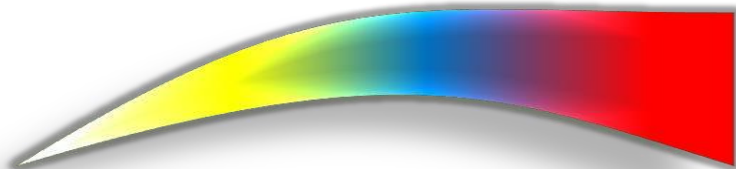
(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tabel T.c-24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp1.726.827.807	Rp 1.234.732.280	Rp1.412.610.620	Rp2.038.263.067		Rp1.244.424.501	Rp1.185.207.837	Rp1.249.042.012	Rp 1.617.489.459		72%	96%	88%	79%		Rp 1.603.108.443	Rp 1.171.401.492
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 182.153.587	Rp 10.187.600	Rp 424.364.940	Rp 766.692.420		Rp 112.028.141	Rp 9.800.000	Rp 419.177.290	Rp 724.646.845		62%	96%	99%	95%		Rp 345.849.637	Rp 300.311.240
Cakupan Penataan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa	Rp1.726.827.807	Rp 1.234.732.280	Rp1.412.610.620	Rp2.038.263.067		Rp1.244.424.501	Rp1.185.207.837	Rp1.249.042.012	Rp 1.617.489.459		72%	96%	88%	79%		Rp 1.603.108.443	Rp 1.171.401.492
Cakupan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -							Rp -	Rp -
Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp2.906.137.200	Rp 2.000.000.000	Rp5.882.651.000	Rp2.329.334.200		Rp 620.750.200	Rp 261.283.400	Rp4.379.651.909	Rp 2.172.272.887		21%	13%	74%	93%		Rp 3.279.530.600	Rp 2.552.996.300
Cakupan Kerjasama	Rp		Rp1.9	Rp4.225.0		Rp	Rp	Rp1.556.055.0	Rp		59%		82%	84%		Rp	Rp

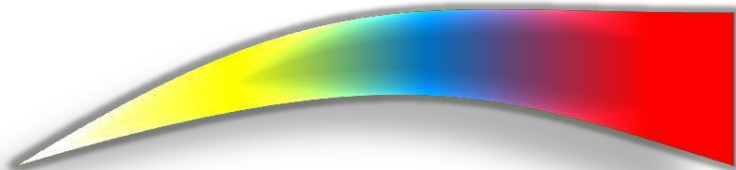


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

dan Tertatanya Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa	690.500.000		04.81 8.752	00.000		406.654.100	-	99	3.563.237.4 28							1.705.079.688	1.532.454.68 8
Cakupan Jumlah Pembentukan, Pelembagaan, Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan BUMdesa	Rp 650.000.000	Rp 650.000.000	Rp 650.000.000	Rp 650.000.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		0%	0%	0%	0%		Rp 650.000.000	Rp 487.500.000
Cakupan Perkembangan Pasar Desa	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000		Rp -					0%	0%	0%	0%		Rp 600.000.000	Rp 450.000.000
Cakupan Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat	Rp2.066.036 .000		Rp1.185.000 0.000	Rp 790.465.000		Rp 269.995.800	Rp -	Rp1.050.616.0 00	Rp 770.897.800		13%		89%	98%		Rp 1.010.375.250	Rp 493.866.250
Cakupan Peran Perempuan di Pedesaan dalam Usaha Produktif	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -							Rp -	Rp -
Cakupan Jumlah Potensi dan Pemanfaatan SDA	Rp 483.220.000	Rp -	Rp 470.000.000	Rp 769.815.100		Rp 339.652.500	Rp -	Rp 367.710.970	Rp 741.310.200		70%		78%	96%		Rp 430.758.775	Rp 309.953.775
Cakupan Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 483.220.000	Rp -	Rp 470.000.000	Rp 769.815.100		Rp 339.652.500	Rp -	Rp 367.710.970	Rp 741.310.200		70%		78%	96%		Rp 430.758.775	Rp 309.953.775
Cakupan Jumlah Fasilitas Sarana Prasarana	Rp 182.153.587	Rp 10.187.600	Rp 424.364.940	Rp 766.692.420		Rp 112.028.141	Rp 9.800.000	Rp 419.177.290	Rp 724.646.845		62%	96 %	99%	95%		Rp 345.849.637	Rp 300.311.240

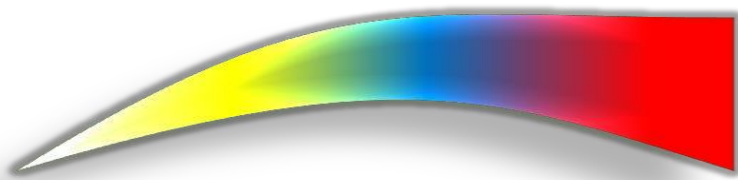


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Cakupan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Aktif	Rp 690.500.000	Rp -	Rp1.9 04.81 8.752	Rp4.225.0 00.000		Rp 406.654.100	Rp -	Rp1.556.055.0 99	Rp 3.563.237.4 28		59%		82%	84%		Rp 1.705.079.688	Rp 1.532.454.68 8
Cakupan Sumberdaya Masyarakat yang Profesional	Rp3.936.244 .000	Rp 750.000.0 00	Rp -	Rp -		Rp 73.596.600	Rp 691.850.800	Rp -			2%	92 %				Rp 1.171.561.000	Rp 187.500.000
Cakupan ketahanan Sosial Masyarakat dalam Pengembangan akses Informasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -

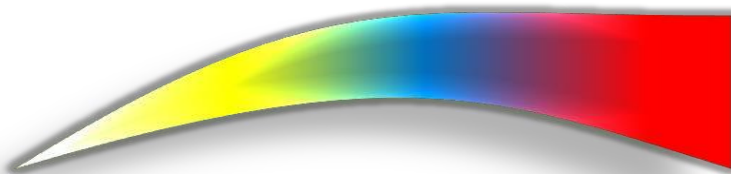


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih Tahun 2021 – 2026 yang memiliki tantangan untuk membantu Bupati dan wakil Bupati Ter-pilih dalam menciptakan :

1. Tata kelola Pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dengan standar Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
3. Menekan/mengurangi angka kemiskinan dengan standar yang ditetapkan melalui Indeks Desa Membangun (IDM); serta
4. Mengembangkan Pelayanan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat, mendorong Pembinaan penguatan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Aparatur Pemerintahan desa yang berkompeten dan Profesional dalam mewujudkan Kemandirian Desa.

Dalam jangka waktu 5 tahun mendatang sesuai dengan fungsi dan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara akan menghadapi berbagai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam mencapai Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:



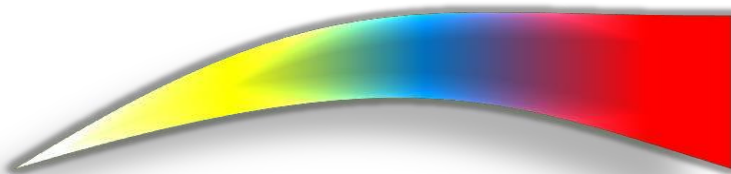
Analisa SWOT
Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

1. PROGRAM PENATAAN DESA

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Strengths / Kekuatan	Weaknesses / Kelemahan	Opportunities / Peluang	Threats / Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan Penataan Desa				
1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Luas Wilayah dan jumlah penduduk	Masih ada Desa yang belum terbit SK batas Desanya	Regulasi Pusat dan daerah	Konflik dan kerawanan Sosial
1.2	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Potensi SDA dan SDM di Desa	Masih banyak desa yang belum membuat Perdes Kewenangan Desa	Regulasi Pusat dan daerah	Konflik kepentingan di Desa
1.3	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa sebanyak 193 Desa	Ada 7 Desa yang salah nama dan kode	Adanya Aplikasi Prodeskel Kemendagri	Perubahan administrasi dan surat menyurat
1.4	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Ketersediaan anggaran dan program dedikasi	Data jumlah dan kondisi sarana prasarana belum termuktahirkan	Kerjasama pihak ketiga yang tidak mengikat dan dana CSR	Status Kepemilikan, Kejelasan batas desa dan surat hibah tidak ada

2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

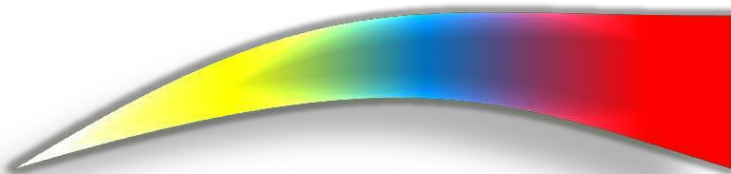
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Strengths / Kekuatan	Weaknesses / Kelemahan	Opportunities / Peluang	Threats / Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa				
1.1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Adanya BKAD eks-PNPM Mandiri Perdesaan	Badan Kerjasama Desa belum di bentuk di Desa	PP 11 Tahun 2021 dan Regulasi Daerah	Konflik kepentingan kepemilikan aset eks PNPM-MP
1.2	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Adanya BKAD eks-PNPM Mandiri Perdesaan	Badan Kerjasama Desa belum di bentuk di Desa	Adanya perusahaan/pihak ketiga yang berusaha di Desa	Terjadinya persaingan dan konflik kepentingan
1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Potensi SDA dan	Belum ada pendataan	Regulasi Pusat dan Daerah serta	Monopoli dan persaingan



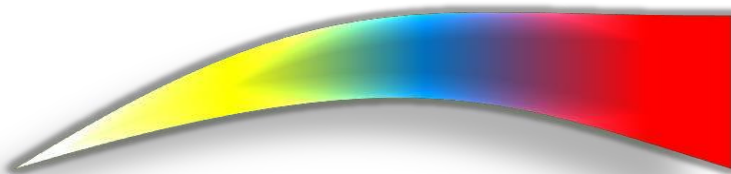
		produk Unggulan kawasan Pedesaan	potensi SDA	keberadaan pihak dunia usaha di Desa	usaha
--	--	----------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------

3. PROGRAM ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN DESA

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Strengths / Kekuatan	Weaknesses / Kelemahan	Opportunities / Peluang	Threats / Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya aplikasi Siskudes dan SIPEDE untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan desa	SDM aparatur Desa relatif masih rendah	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa	Pandemi / bencana non alam
1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kesadaran pemerintah Desa dan Masyarakat Desa akan kebutuhan produk hukum di Desa	SDM aparatur Desa dan BPD relatif masih rendah	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa	Produk Hukum Desa di buat oleh orang lain/pihak ke 3
1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya aplikasi Siskudes dan SIPEDE untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan desa	SDM aparatur Desa relatif masih rendah	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa	Pandemi / bencana non alam
1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya aplikasi Siskudes dan SIPEDE untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan desa	SDM aparatur Desa relatif masih rendah	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa	Pandemi / bencana non alam
1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kebijakan Pemerintah daerah dan ketersediaan Anggaran	Keterbatasan jumlah dan kemampuan ASN di lingkup OPD	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa	Pandemi / bencana non alam
1.6	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Adanya Tim Evaluasi di Kecamatan	SDM aparatur Desa dan BPD relatif masih rendah	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas	Pandemi / bencana non alam



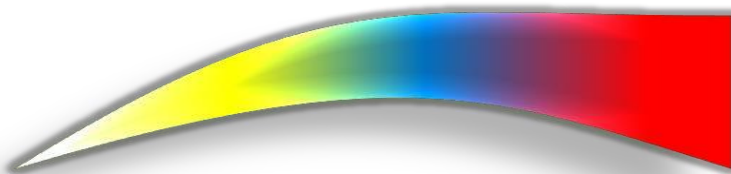
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Strengths / Kekuatan	Weaknesses / Kelemahan	Opportunities / Peluang	Threats / Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Aparatur pemerintah desa	
1.7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Adanya Lembaga UPK dan BKAD eks-PNPM Mandiri Perdesaan	Keterbatasan jumlah dan kemampuan ASN di lingkup OPD	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Pengembangan BUM Desa dan Kerjasama anatar Desa	Pandemi / bencana non alam
1.8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kebijakan Pemerintah daerah dan ketersediaan Anggaran	SDM Panitia Pemilihan Desa dan BPD relatif masih rendah	Kemitraan dengan pihak keamanan dan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pilkades	Konflik kepentingan dan kerawanan sosial
1.9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kebijakan Pemerintah daerah dan ketersediaan Anggaran	SDM Tim penjangkaran perangkat Desa dan BPD relatif masih rendah	Kemitraan dengan pihak keamanan dan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pilkades	Konflik kepentingan dan kerawanan sosial
1.10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kebijakan Pemerintah daerah dan ketersediaan Anggaran	SDM aparatur Desa relatif masih rendah	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa	Profil Desa di buat oleh orang lain/pihak ke 3
1.11	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kebijakan Pemerintah daerah dan ketersediaan Anggaran	SDM aparatur Desa relatif masih rendah	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa	Konflik Kelembagaan
1.12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kebijakan Pemerintah daerah dan ketersediaan Anggaran	SDM aparatur Desa relatif masih rendah	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Konflik kepentingan di Desa
1.13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kesadaran Anggota BPD akan kebutuhan peningkatan Kapasitas BPD	Keterbatasan jumlah dan kemampuan ASN di lingkup OPD	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pandemi / bencana non alam
1.14	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kebutuhan Desa terhadap kejelasan batas wilayah Desa	SK Batas Desa beberapa Desa belum terbit	Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Batas Desa	Konflik kepentingan dan kerawanan sosial
1.15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kesadaran Kepala Desa	Keterbatasan jumlah dan kemampuan ASN	Kemitraan dengan lembaga Pendamping,	Laporan Kepala Desa di buat



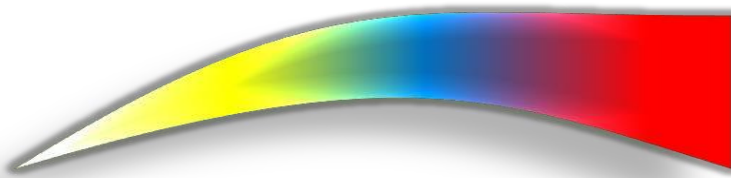
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Strengths / Kekuatan	Weaknesses / Kelemahan	Opportunities / Peluang	Threats / Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		atas Laporan Kepala Desa sebagai Dasar Kinerja Pemerintah Desa	di lingkup OPD	Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	oleh orang lain/pihak ke 3
1.16	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Regulasi dan Kebijakan Daerah	SDM aparatur Desa relatif masih rendah dan ketersediaan anggaran	Kemitraan dengan lembaga Pendamping dan Perguruan Tinggi	Konflik kepentingan di Desa
1.17	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kebijakan dan program pemerintah Daerah	SDM aparatur Desa relatif masih rendah dan ketersediaan anggaran	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan pihak dunia usaha	Konflik kepentingan di Desa

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Strengths / Kekuatan	Weaknesses / Kelemahan	Opportunities / Peluang	Threats / Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Keberadaan beberapa Suku dan Kelompok Masyarakat Hukum Adat	Data keberadaan Masyarakat Hukum Adat belum termuktahirkan	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan LSM	Konflik Kepentingan
1.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendaaygunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kesadaran akan peran dan fungsi LKD	SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa relatif masih rendah dan keterbatasan anggaran	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat	Pandemi / bencana non alam
1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kesadaran akan pentingnya Peningkatan	SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa relatif masih rendah dan keterbatasan anggaran	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat	Pandemi / bencana non alam



No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Strengths / Kekuatan	Weaknesses / Kelemahan	Opportunities / Peluang	Threats / Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hukum Adat	Kapasitas LKD			
1.4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kesadaran akan ketersediaan Sarana dan Prasarana LKD	Ketersediaan lokasi dan keterbatasan anggaran	Kemitraan dengan Dunia Usaha di Desa	Konflik kepentingan antar LKD
1.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Potensi SDA dan terbentuknya BUM Desa	Keterampilan Kelompok Masyarakat relatif rendah dan data aset Desa belum termutakhirkan	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat	Persaingan usaha dengan pihak ke tiga
1.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Banyaknya masyarakat desa yang menggunakan dan memanfaatkan TTG	Belum dilakukan pendataan dan inventarisasi serta publikasi TTG di masyarakat Desa	Hak paten dan keberadaan Warteg Desa	Pencurian terhadap Hak cipta intelektual
1.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kebijakan pemerintah daerah melalui program 50 juta per RT per tahun	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan keswadayaan dan Gotong Royong	Lomba Kegiatan Gotong Royong	Konflik kepentingan
1.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kebijakan Pemerintah daerah dan ketersediaan Anggaran	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesadaran Hukum	Kemitraan dengan pihak keamanan dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Konflik kepentingan dan kerawanan sosial
1.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kesadaran akan pentingnya Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	SDM Tim Penggerak PKK Desa relatif masih rendah dan keterbatasan anggaran	Kemitraan dengan lembaga Pendamping, Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Masyarakat	Pandemi / bencana non alam



BAB III

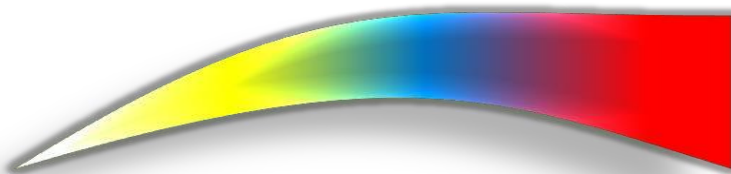
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kebijakan pengembangan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada Pemberdayaan Masyarakat dalam Menanggulangi kemiskinan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai salah satu indikator kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan potensi yang ada.

Upaya untuk meningkatkan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, masih terhambat oleh permasalahan antara lain masih relatif rendahnya kapasitas kualitas sumber daya manusia aparatur yang masih perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan riil organisasi.

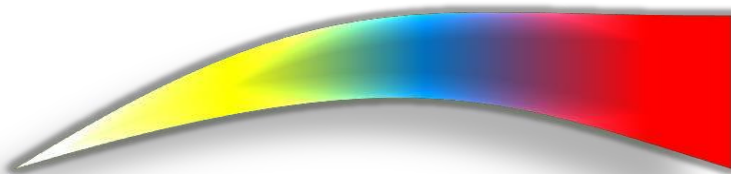
Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki kompetensi yang memadai, mental yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama (share vision) serta kemampuan membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap



permasalahan dilingkungan strategis organisasi yang dihadapi, Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tabel T.C.-35

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	
Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Akuntabel	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Desa	1.	Belum optimalnya penataan desa
		2.	Masih perlu adanya penataan, kewenangan, penamaan, kode desa, sarana prasarana desa
		3.	Adanya data sarana dan prasarana desa yang belum termutakhirkan
		4.	Ada beberapa desa yang belum akses air minum dan sanitasi yang layak
		5.	9 Desa yang belum adanya kajian terkait program terang kampongu
	Belum optimalnya Kerjasama Antar Desa	1.	Belum teridentifikasinya potensi wilayah yang ditetapkan sebagai kerjasama kawasan pembangunan perdesaan
		2.	Belum terfasilitasinya kerjasama desa berdasarkan potensi desa
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Akuntabel	1.	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
		2.	Belum dievaluasinya produk Hukum Desa
		3.	Masih terdapat desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum sesuai dengan pedoman
		4.	Belum terevaluasinya Profil Desa, Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan secara berkelanjutan
		5.	Belum tepatnya unit usaha BUMDesa dengan potensi yang ada di desa
		6.	Belum terfasilitasinya manajemen pemerintahan desa dengan baik
		7.	Masih terdapat beberapa desa yang belum adanya kesepakatan tapal batas
	Belum optimalnya	1.	Belum terfasilitasinya kegiatan masyarakat



PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	
	peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Desa		hukum adat
		2.	Perlu kontinuitas database LKD dan LAD
		3.	Rendahnya kapasitas SDM kader LKD dan LAD
		4.	Masih rendahnya kinerja Kelembagaan LKD, LAD
		5.	Belum terfasilitasinya pengelolaan manajemen pasar desa kepada pemerintah desa dan pengelola pasar desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat
		6.	Kurangnya kesadaran gotong royong dan ketahanan masyarakat
		7.	Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan kelompok usaha masyarakat dan rumah tangga miskin di pedesaan
		8.	Minimnya fasilitasi kegiatan TTG

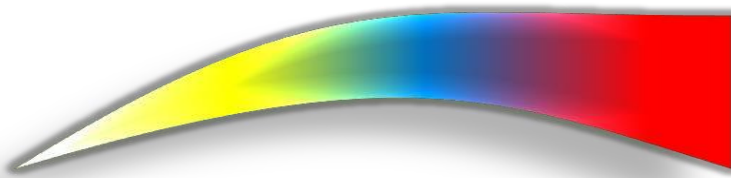
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Visi :

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan berbahagia”

Batasan Pengertian :



Sejahtera : Kondisi masyarakat yang mudah mendapatkan akses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan, di Kutai Kartanegara.

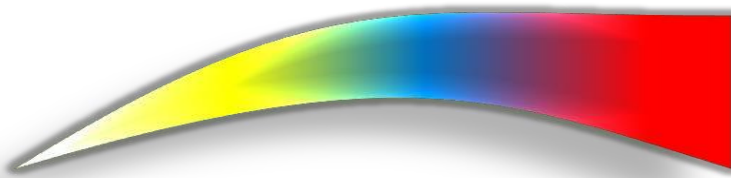
Berbahagia : Kondisi masyarakat yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di Kutai Kartanegara.

Dalam Rangka Menjamin Keberhasilan Visi maka disusun 5 Misi Pembangunan sebagai berikut:

- 1) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
- 2) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
- 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Misi 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Sasaran Kebijakan : Penguatan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Kualitas Layanan publik, Fasilitasi Kesejahteraan ASN, dan Penerapan Kerjasama Pemerintah Daerah.



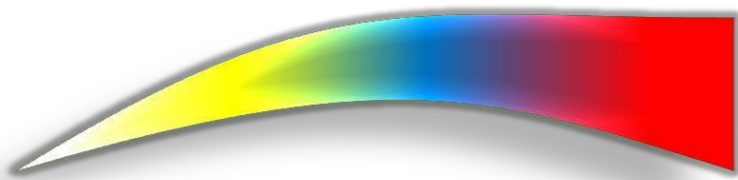
Program Prioritas :

2. Program Aparatur Negara Bahagia

Merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN untuk abdi negara di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat memiliki jaminan hari tua dan tambahan pendapatan melalui pemanfaatan keanggotaan KORPRI dengan menangkap peluang usaha dibawah manajemen KOPERASI ASN KUKAR yang profesional dan produktif. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT.

4. Program Keluarga Peduli Kesehatan Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk:

- a) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbasis indeks keluarga sehat dan pola hidup bersih dan sehat pada desa dan kelurahan, yang dilaksanakan secara sinergi mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dunia usaha dan perguruan tinggi, dengan melakukan serangkaian kegiatan membangun, merevitalisasi dan mengaktifkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di setiap desa/kelurahan serta Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
- b) Memperkuat dan memperluas program RAGAPANTAS dengan target menurunkan angka stunting dibawah target nasional yakni dibawah 14%



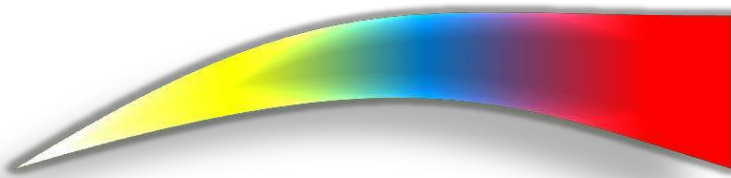
dan menyediakan layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat prasejahtera (gratis BPJS).

- c) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pencegahan dan penanganan pandemi COVID 19, dengan meningkatkan jaringan kemitraan antar lembaga pemerintah, non pemerintah sampai pada level keluarga dan komunitas secara terpadu, dengan membentuk Desa/Kelurahan Sehat.

8. Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN

Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menempatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial agar menjadi hal utama dalam penetapan kebijakan pembangunan Daerah, dengan mengklasifikasikan penanganan melalui RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan, dengan dua pilar utama yakni pertama, bantuan langsung kepada masyarakat miskin (jompo, anak-anak dan disabilitas), kedua program pemberdayaan berdasarkan potensi yang dimiliki. RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan ini dijadikan sebagai simpul sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa.

Salah satu kegiatan strategis RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan adalah Bedah Rumah minimal sebanyak 500 rumah pertahun, Memberikan Jaminan Sosial bagi 3.000 masyarakat miskin dan Fasilitas Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin minimal 1.000 Penduduk Pertahun yang dengan sasaran program pada verifikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.



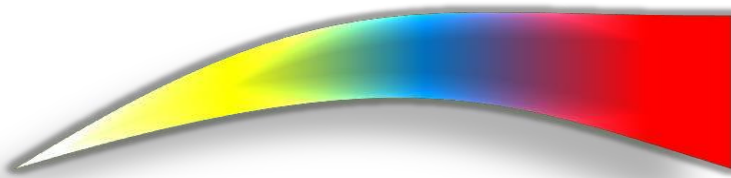
Misi 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Sasaran Kebijakan : Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas, Optimalisasi Potensi Wisata ALAM, SEJARAH DAN BUDAYA, dan Pengembangan UMKM

1. Program pembangunan pertanian berbasis kawasan

Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi KUTAI KARTANEGARA, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastruktur wilayah (jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUM Desa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, dan meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 Hektar, dan Fasilitas sarana dan prasarana 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.

3. Program Air Bersih Desa



Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menye-diakan Air Bersih bagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong BUM Desa sebagai pengelola Air Bersih secara mandiri. Dengan kegiatan prioritas membangun Pengelolaan Air Bersih sederhana minimal 50 Unit selama periode kepemimpinan.

4. Program Terang Kampongu

Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menye-diakan dan memfasilitasi energy ramah lingkungan terbarukan yang diutamakan pada daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh layanan PLN, yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh BUM Desa, target 17 Desa Terpencil/Remote Area.

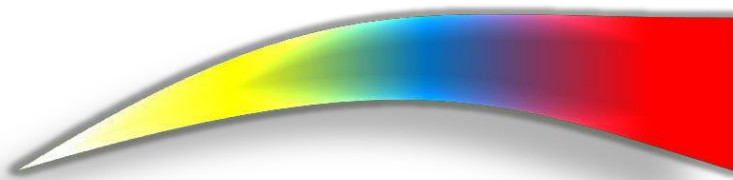
1 VISI (SEJAHTERA DAN BAHAGIA), 6 CITA KUKAR IDAMAN, 5 MISI PEMBANGUNAN

Tujuan :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja,
- Meningkatkan percepatan pengentasan kemiskinan.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa.

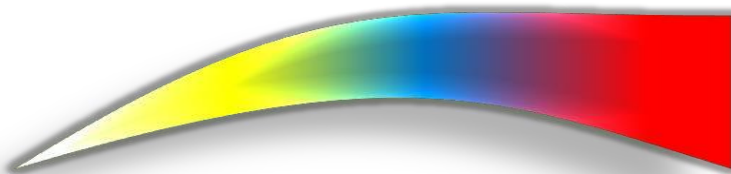
Dengan Indikator : Indeks Desa Membangun (Prosentase Desa Berkembang)



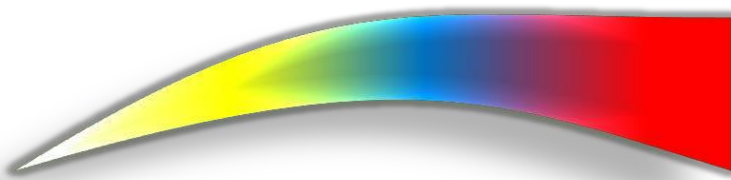
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tantangan kedepan yang diantisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

		KABUPATEN		PROVINSI		PUSAT
Visi	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia		Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat		Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Sejahtera	;	Kondisi masyarakat yang mudah mendapatkan akses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan, di Kutai Kartanegara				
Berbahagia	;	Kondisi masyarakat yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di Kutai Kartanegara				



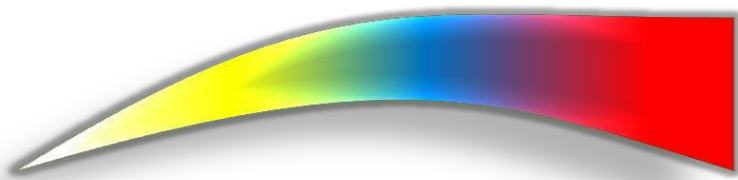
		KABUPATEN		PROVINSI		PUSAT
Misi Strategis RPJMD	;	1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani	4	Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia
	;	2. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya		-	2	Struktur ekonomi yang produktif mandiri dan berdaya saing
	;	3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.	2	Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan	3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan
	;	4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.	3	Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan	4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
	;	5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1	Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
					6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
					7	Perlindungan bagi setiap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga



		KABUPATEN		PROVINSI		PUSAT
					8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
					9	Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan

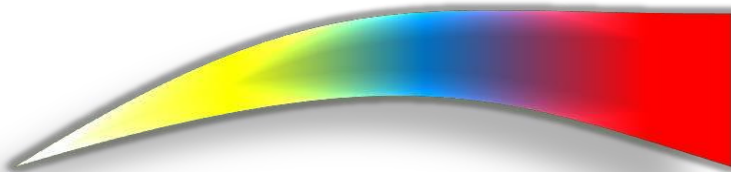
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 mengalami Revisi RTRW yang merupakan penyempurnaan materi RTRW untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan masa depan dan menambahkan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS). penyempurnaan materi RTRW, berakibat pada perubahan kebijakan, rencana, dan program (KRP), dimana terdapat 11 isu pembangunan berkelanjutan (PB) prioritas dalam kajian pengaruh KRP terhadap isu PB prioritas, yaitu potensi bencana alam tinggi, alih fungsi lahan, kerusakan hutan lahan, kegiatan kawasan pertambangan, pengelolaan sampah limbah B3 yang belum tertangani, serta pengelolaan air limbah domestik yang menyebabkan pencemaran. Sarana prasarana umum yang masih belum memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perubahan lingkungan sekitar perairan pesisir dan



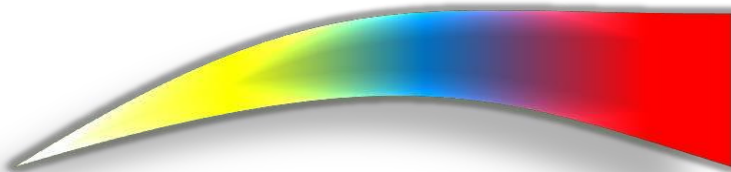
danau, sarana prasarana air minum dan sanitasi yang terbatas, serta potensi pengembangan dan pengelolaan pariwisata.

Terdapat beberapa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang menjadi prioritas untuk dilakukan kajian dalam muatan KLHS, yaitu aspek rencana dari 21 jenis rencana pola ruang. dokumen KLHS RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat saran dan masukan untuk perbaikan dari Tim Validasi KLHS RTRW/Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Tahun 2021, hal ini akan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 mengatur rencana struktur ruang dan pola ruang, menjadi acuan Dinas PMD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya agar dapat mewujudkan sumber daya alam dan sumber daya buatan, perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dalam lingkup Kabupaten. Telaah permasalahan pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan rencana tata ruang dan wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya adalah sebagai berikut:

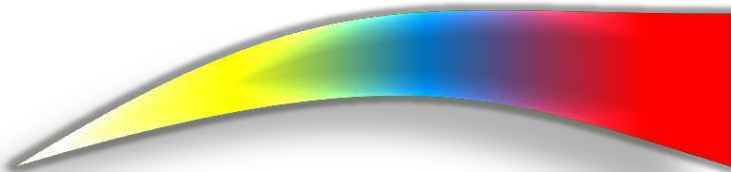


Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

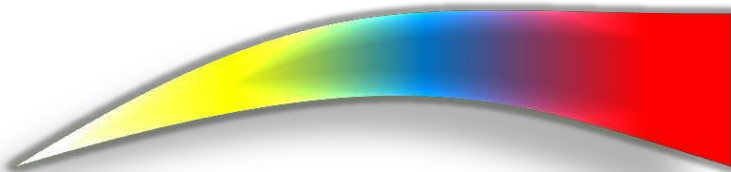
No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke- I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Sistim Pusat Kegiatan						
I.1	Sistim Perkotaan						
I.1.1	Pusat Kegiatan Perkotaan						
I.1.1.1	PKN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v



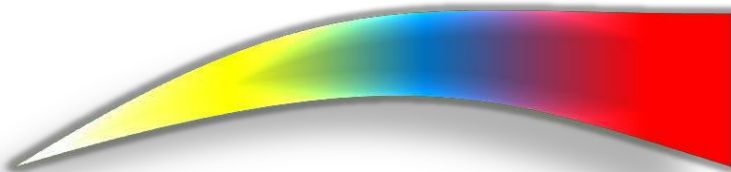
No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke- I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB KUTAI KARTANEGARA,	v	v	v	v
I.1.1.2	PKL						
I.1.2	Fungsi Layanan						
1,2	Sistim Pedesaan						
I.2.1	Pusat Kegiatan Perdesaan						
I.2.1.1	PPL	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v



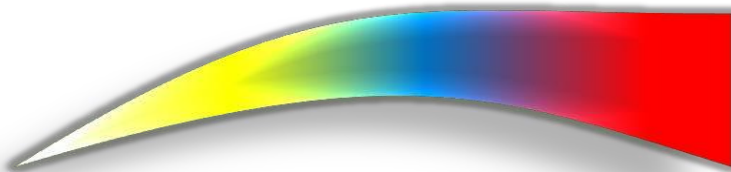
No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke- I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v



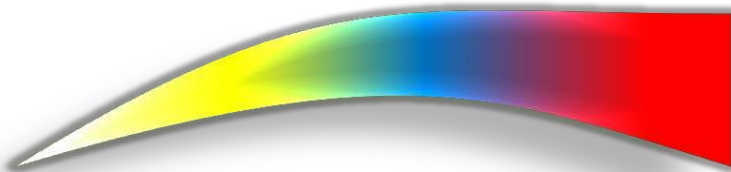
No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke- I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v



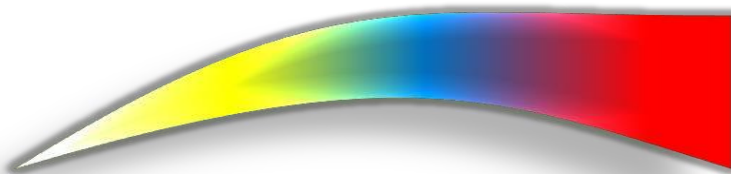
No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke- I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		oleh Desa					
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v



No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke- I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketersiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v



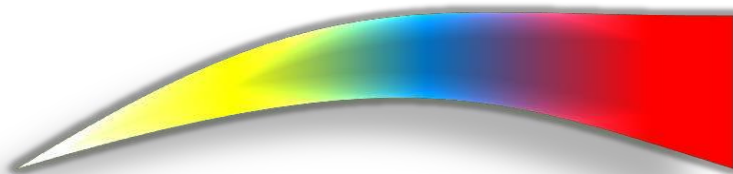
No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke- I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.2.1.2	Kawasan Minapolitan	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Mulawarman	v	v		
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Desa	v	v	v	v
I.2.2	Fungsi Layanan						
I.2.2.1	Pusat Pelayanan Perdesaan						
I.2.2.2	Pusat Transportasi Antar Desa						
I.2.2.3	Pusat Pelayanan Pemukiman Perdesaan						
II	Sistim Jaringan Prasarana Wilayah						
II.1	Sistim Prasarana Utama						
II.1.1	Jaringan Transportasi Darat						
II.1.2	Jaringan Perkeretaapian						
II.1.3	Jaringan Transportasi Laut						
II.1.4	Jaringan Transportasi Udara						
II.2	Sistim Prasarana Lainnya						
II.2.1	Sistim Jaringan Energi						
II.2.2	Sistim Jaringan Telekomunikasi						
II.2.3	Sistim Jaringan Sumberdaya air						



No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke- I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.2.4	Sistim Jaringan Prasarana Lingkungan						

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

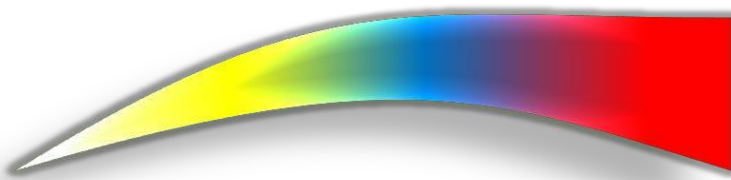
No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima tahun ke- I	Lima tahun ke- II	Lima tahun ke- III	Lima tahun ke- IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Kawasan Lindung						
I.1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya						
I.2	Kawasan Perlindungan setempat						
I.3	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya						
I.4	Kawasan Rawan Bencana Alam						
I.5	Kawasan Lindung Geologi						
II	Kawasan Budidaya						
II.1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi						
II.2	Kawasan Peruntukan Pertanian						
II.3	Kawasan Peruntukan Perikanan						
II.4	Kawasan Peruntukan Pertambangan						
II.5	Kawasan Peruntukan Industri						
II.6	Kawasan Peruntukan Pariwisata						
II.7	Kawasan Peruntukan Pemukiman						
II.8	Kawasan Peruntukan Lainnya						



Telaah permasalahan pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya adalah sebagai berikut:

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

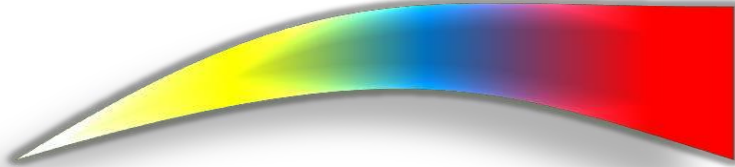
No	KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II	Kajian Lingkungan Hidup Strategis			
1	Isu pembangunan berkelanjutan strategis yang memiliki dampak besar terhadap kondisi lingkungan hidup di kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan tugas dan fungsi Dinas PMD adalah kemiskinan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan	• Belum akuratnya data angka kemiskinan di Pedesaan • Belum terfasilitasinya pengelolaan manajemen pasar desa kepada pemerintah desa dan pengelola pasar desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat • Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan kelompok usaha masyarakat dan rumah tangga miskin di pedesaan • Belum adanya data identifikasi, Penilaian Kinerja Posyandu yang sudah ada serta Kajian dan Analisis Kebutuhan posyandu di Desa	• Tingginya angka perpindahan penduduk di pedesaan sehingga data penduduk terutama penduduk miskin tidak akurat • Desa belum membuat Perdes Kewenangan Desa; terutama tentang pengelolaan pasar desa • Desa lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur sehingga kegiatan pelatihan keterampilan usaha terutama kelompok miskin di pedesaan sangat kurang • Belum dilakukan analisis dan kajian kondisi dan kebutuhan posyandu di desa	Adanya beberapa program Dedikasi Unggulan Visi Misi Kabupaten Kutai Kartanegara



3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dan telaahan terhadap RPJMD maka isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Predikat akuntabilitas kinerja DPMD
2. Validasi Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Daerah Terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kinerja Dinas PMD
4. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Desa
5. Perencanaan yang Berbasis Potensi Unggulan Desa dan Wilayah
6. Pendampingan Pembangunan kawasan dan kerjasama Desa
7. Terbatasnya Data Sarana & Prasarana Desa
8. Peran Lembaga dalam mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

BAB IV

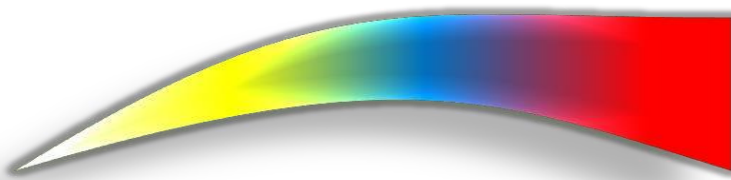
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berikut ditampilkan tujuan dan sasaran dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026.

T.C-25

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Prosentase tingkat perkembangan lembaga kemasyarakatan	Prosentase			100	100	100	100	100	100
			Prosentase tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase			100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar	Prosentase	58,55	10	10	10	10	10	10	50



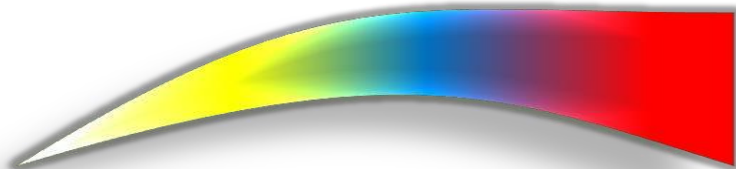
BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.



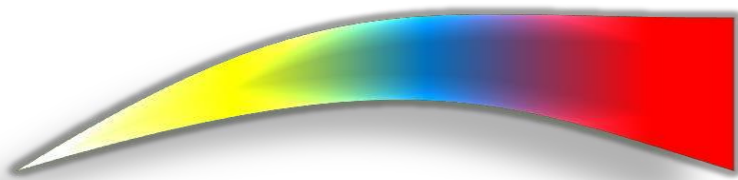
RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

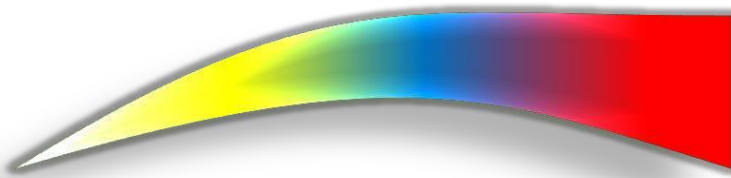
Tabel T.C-26

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Desa	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan, kewenangan, penamaan, kode desa, dan sarana prasarana desa
			2. Peningkatan kerjasama antar desa dan Kawasan Pedesaan berdasarkan potensi yang dimiliki	1. Meningkatkan Kerjasama Desa berbasis Kawasan Pertanian dalam arti luas
				2. Mengidentifikasi kawasan perdesaan berbasis potensi komoditas unggulan desa
			3. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa
				2. Memperkuat kapasitas fiskal desa dengan mengoptimalkan spesifik grant (bantuan keuangan khusus) kepada desa
				3. Membentuk gugus tugas pendamping desa dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan/teknis
				4. Mendorong BUMDesa untuk mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat (Pertanian, air bersih, dan listrik desa dll)
			4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan desa/Kelurahan	1. Revitalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				2. Optimalisasi Peran RT melalui pengalokasian 50 juta rupiah per RT
				3. Mendorong Ekonomi Masyarakat dengan menggali potensi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				4. Mengembangkan semangat Gotong Royong dan Tetap Menjaga Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat



Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan OPD Visi : Mewujudkan
Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” Misi :

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudidaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah



BAB VI

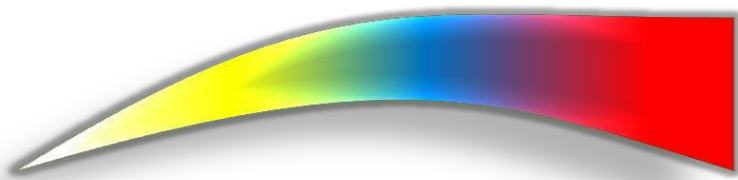
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari penjabaran visi dan misi, tujuan, sasaran yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan lebih teknis dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada :

1. Pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan
3. ketiga, program prioritas urusan wajib.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

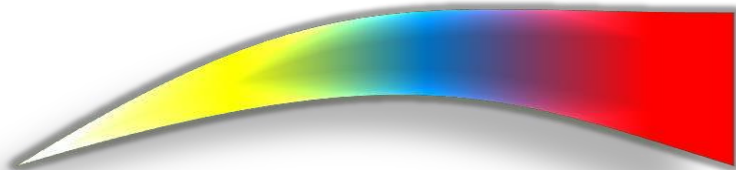
Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang



telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan.

Penentuan Kelompok sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.



RENSTRA

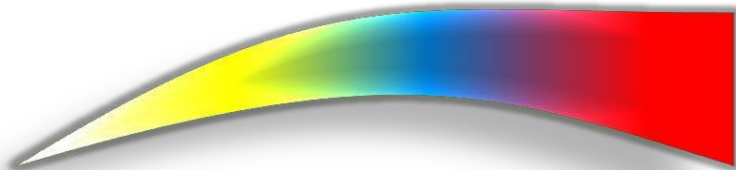
(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tabel. 6.1
T-C 27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Status Desa Berkembang menjadi Desa Maju di Kukar	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	73,58	77	15.813.601.220	80	18.399.860.833	82	17.773.200.833	84	17.899.530.833	85	17.587.030.833	85	87.473.224.552	Dinas PMD		
		2	13	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	180.000.000	100	449.894.400	100	349.894.400	100	449.894.400	100	429.894.400	100	1.859.577.600			
		2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	9	180.000.000	9	449.894.400	10	349.894.400	10	449.894.400	10	429.894.400	48	1.859.577.600	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Laporan	24	12	13.677.463.112	12	14.238.185.961	12	14.561.855.961	12	14.238.185.961	12	14.238.185.961	60	70.953.876.956			

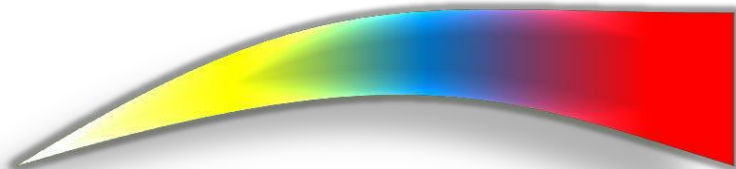


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp				Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Oran g/Bulan	107	2.782	13.429.557.344	2.782	13.990.280.193	2.782	14.313.950.193	2.782	13.990.280.193	2.782	13.990.280.193	13.910	69.714.348.116	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/SKPD	Dokumen	24	12	247.905.768	12	247.905.768	12	247.905.768	12	247.905.768	12	247.905.768	60	1.239.528.840	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	40.800.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	5	232.800.000			
		2	13	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	3	1	40.800.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	5	232.800.000	Dinas PMD	OPD	

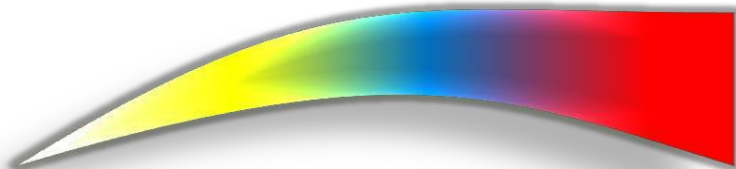


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp				Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	10	20	85.710.881	20	250.000.000	20	200.000.000	20	250.000.000	20	200.000.000	100	985.710.881			
		2	13	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	10	22	85.710.881	50	250.000.000	50	200.000.000	50	250.000.000	50	200.000.000	222	985.710.881	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	17	17	505.000.000	20	1.050.000.000	23	850.000.000	23	1.050.000.000	17	957.500.000	100	4.412.500.000			
		2	13	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	Jenis	35	20	180.000.000	27	250.000.000	27	200.000.000	27	250.000.000	27	200.000.000	128	1.080.000.000	Dinas PMD	OPD	

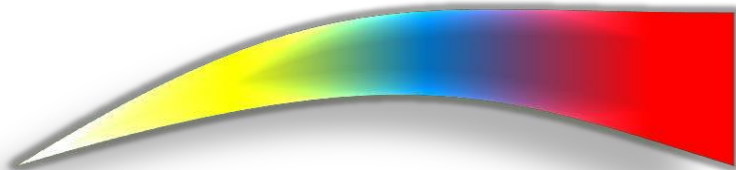


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah bahan Logistik Kantor	Jenis	21	25		32		32		32		32		153		Dinas PMD	OPD	
								Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu	Porsi	889	720		720		727		727		727		3.621		Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Lembar	37.975	48.000	50.000.000	48.000	50.000.000	52.000	50.000.000	52.000	50.000.000	52.000	50.000.000	252.000	250.000.000	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	Exemplar	9276	1.848	50.000.000	1.848	50.000.000	1.860	50.000.000	1.860	50.000.000	1.860	50.000.000	9.276	250.000.000	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/hari	50	50	125.000.000	300	300.000.000	300	250.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	1250	1.275.000.000	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata	Dokumen	186	186	0	186	300.000.000	186	200.000.000	186	300.000.000	186	200.000.000	930	1.000.000.000	Dinas PMD	OPD	

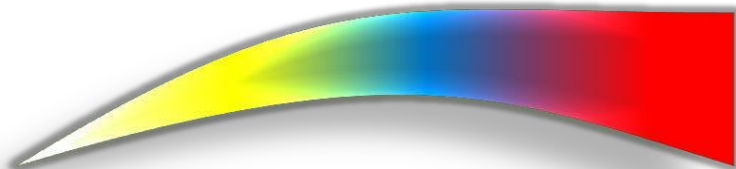


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Aplikasi	1	1	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	157.500.000	13	557.500.000	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	50.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	650.000.000			
		2	13	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	5	15	50.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	135	650.000.000	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	16	17	1.134.951.527	20	1.813.780.472	23	1.363.450.472	23	1.463.450.472	17	1.313.450.472	100	7.089.083.415			

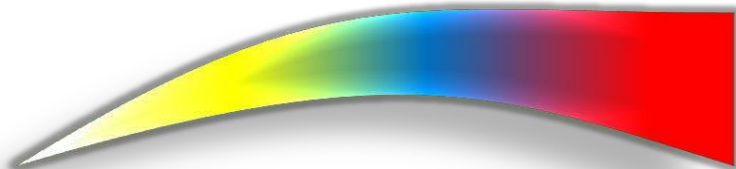


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya	Lembar	673	1.000	7.403.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	5.000	47.403.000	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Internet dan TV Kabel	Rekening /bulan	48	24	184.098.055	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	120	984.098.055	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	3	4	40.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	44	440.000.000	Dinas PMD	OPD	
							Jumlah sewa mobil dinas pejabat	Unit /Bulan	30	0	6	600.330.000	6	150.000.000	6	250.000.000	6	100.000.000	24	1.100.330.000	Dinas PMD	OPD			
		2	13	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor Tenaga Pendukung Non PNS	Orang	600	46	903.450.472	46	903.450.472	46	903.450.472	46	903.450.472	46	903.450.472	230	4.517.252.360	Dinas PMD	OPD	

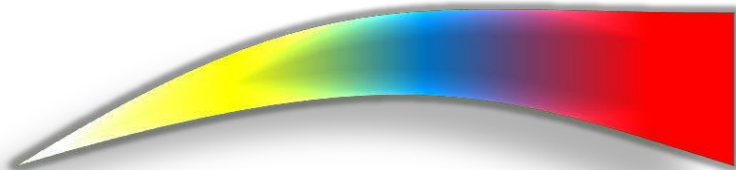


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	16	17	139.675.700	20	400.000.000	23	250.000.000	23	250.000.000	17	250.000.000	100	1.289.675.700			
		2	13	01	2,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	Unit	5	15	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	95	500.000.000	Dinas PMD	OPD	
		2	13	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin dan lainnya yang dipelihara	Unit	13	15	39.675.700	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	415	239.675.700	Dinas PMD	OPD	

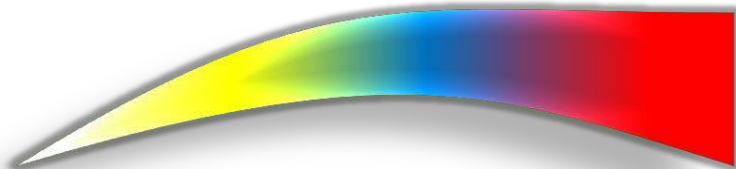


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	10	0	0	1	250.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	550.000.000	Dinas PMD	OPD	
		2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	n.a	1,55	370.000.000	5,18	520.000.000	10,36	370.000.000	25,91	420.000.000	38,86	350.000.000	38,86	2.030.000.000	Dinas PMD		
		2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	Desa	8	33	370.000.000	31	520.000.000	27	370.000.000	32	420.000.000	28	350.000.000	151	2.030.000.000			
		2	13	02	2,01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Desa	Desa	3	6	120.000.000	6	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	1	100.000.000	19	580.000.000	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait : Bagian Pemerintahan
		2	13	02	2,01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Kewenangan	Desa	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	50	500.000.000	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait : Kecamatan, Desa, Bagian Hukum

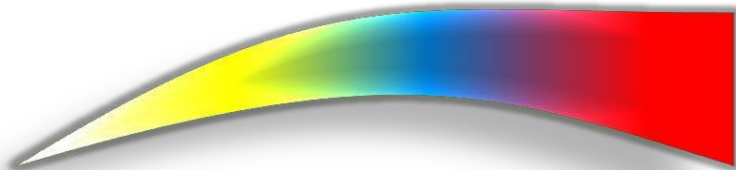


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp				Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Jumlah Hasil Kajian	Dokumen	0	1		0		0		0		0		1			Dinas PMD	Desa	
		2	13	02	2,01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	0	6	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	6	50.000.000	21	250.000.000	Dinas PMD	Desa	
		2	13	02	2,01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Sarana Prasarananya	Desa	5	10	100.000.000	10	250.000.000	10	100.000.000	15	150.000.000	10	100.000.000	55	700.000.000	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait : Dinas Perumahan & Pemukiman , Bappeda, Dinkes
							Jumlah Desa yang dimonev sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	1		1		1		4		Dinas PMD		Desa				
							Jumlah aplikasi Sarana Prasarana Desa	Aplikasi	0	0	1		0		0		1		Dinas PMD		Desa				

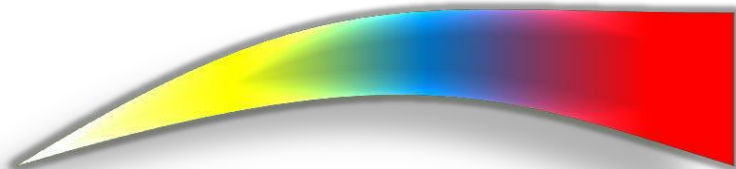


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	n.a	100	300.000.000	100	900.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	2.300.000.000	Dinas PMD		Mendukung Prioritas Pengembangan Kawasan Pertanian
		2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	Desa	42	34	300.000.000	106	900.000.000	96	300.000.000	16	400.000.000	16	400.000.000	268	2.300.000.000			
		2	13	03	2,01	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Data potensi desa yang akan bekerjasama	Dokumen	2	1	100.000.000	1	400.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	900.000.000	Dinas PMD	Desa	
						Jumlah desa yang difasilitasi untuk bekerjasama		Desa	13	16	16		8		8		8		56		Dinas PMD		Desa		

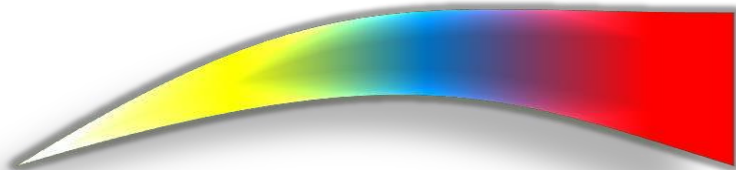


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp				Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Desa yang disosialisasikan tentang regulasi kerjasama desa	Desa	13	0		80		79		0		0		159		Dinas PMD	Desa	
		2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	Desa	13	12	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	28	500.000.000	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait : Pihak Swasta
		2	13	03	2,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi	Kawasan	2 (kawasan sudah terbentuk)	2	2		1		0		0		5		Disperanak Perkim DPU Disperindag	Desa		
								Jumlah Data potensi per desa dan potensi unggulan desa	Dokumen	1	2	100.000.000	2	400.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	900.000.000	Dinas PMD	Desa	
								Jumlah Kawasan yang dimonev	Dokumen	0	1		1		1		1		1		5				

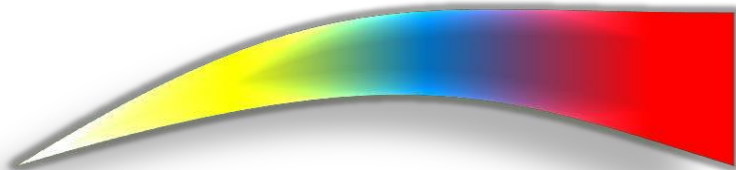


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	16	50	8.956.085.828	70	5.994.755.828	80	4.145.085.828	90	8.475.085.828	95	4.095.085.828	95	31.666.099.140	Dinas PMD		Mendukung Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
								Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	188	10		10		10		10		10		50		Dinas PMD		dan DPPKB terkait regulasi
		2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Desa	193	193	8.956.085.828	193	5.994.755.828	193	4.145.085.828	193	8.475.085.828	193	4.095.085.828	193	31.666.099.140			
		2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan/Kasus yang difasilitasi	Kasus	5	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	40	500.000.000	Dinas PMD	Desa	

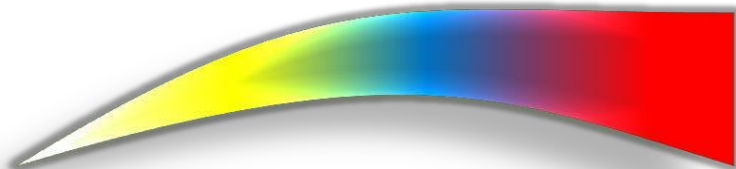


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	04	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun	Dokumen	8	10	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	30	500.000.000	Dinas PMD	Kab. Kutai Kartanegara	
		2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	28	28	120.000.000	28	120.000.000	28	120.000.000	28	120.000.000	28	120.000.000	140	600.000.000	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait : Bappeda
		2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan	Desa	40	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	150	500.000.000	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait : BPKAD, Inspektorat
						Jumlah Desa yang dimonev		Desa	23	25	25		25		25		125		Desa						
						Jumlah Kecamatan yang mengikuti pembekalan		Kecamatan	16	16	16		16		16		16		80		Kecamatan				

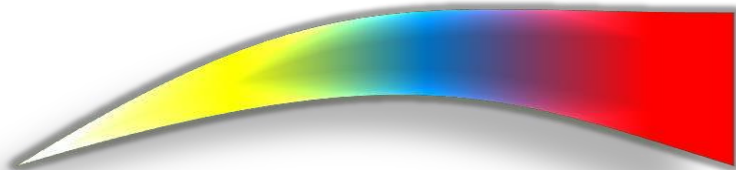


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang difasilitasi Jaminan Sosial	Orang	1.685	1.750	2.716.085.828	1.750	2.754.755.828	1.750	2.525.085.828	1.750	2.525.085.828	1.750	2.525.085.828	8.750	13.046.099.140	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait : BPKAD, BPJS
						Jumlah Kepala Desa Yang di Bimtek		Orang	0	0	86		0		107		0		193		Desa				
						Jumlah Pendamping yang dilatih		Orang	0	0	237		0		0		237		Desa						
		2	13	04	2,01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	Perdes	0	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	75	500.000.000	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait : Bagian Hukum
		2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Unit Usaha BUMDesa (Kelistrikan dan Air Bersih Desa) yang difasilitasi	Bum Desa	15	13	100.000.000	15	300.000.000	13	100.000.000	14	150.000.000	68	800.000.000	Dinas PMD	Desa			
								Jumlah Pembinaan Unit Usaha BUMDesa	Bum Desa	15	10		10		10		50								

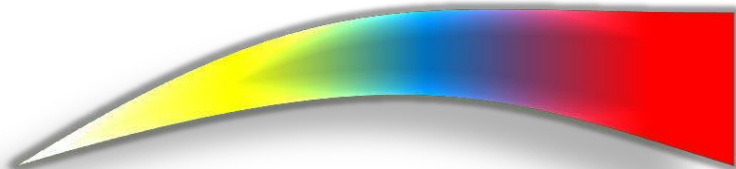


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Jumlah yang mengikuti Pelatihan Manajemen BUMDesa	Orang	25	115		116		116		116		116		579		Dinas PMD	Desa		
							Jumlah Pembentukan dan Pembinaan BUMDesa/ BUMDesma yang mengelola Pertanian	Bumdesma	188	2		2		1		2		2		9		Dinas PMD	Kab. Kutai Kartanegara		
							Jumlah Peserta Rakor BUMDesa	Orang	193	386		386		386		386		386		1930		Dinas PMD	Kab. Kutai Kartanegara		
		2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Instansi Penerima Hibah	Instansi	4	4	4.500.000.000	0	-	0	0	4	4.000.000.000	0	0	8	8.500.000.000	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait :

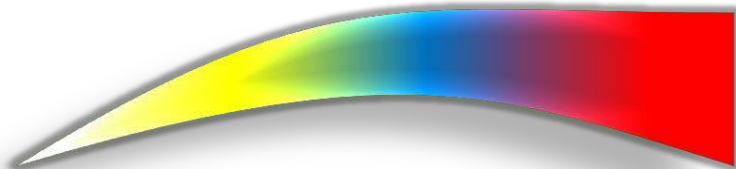


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan				
											2022		2023		2024		2025					2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Targ et	Rp	Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Kepala Desa Yang terpilih	Orang	105	86		0		0	0	107		0	0	193			Desa	Kesbangpol Bag. Tata Pemerintahan, Kecamatan Kodim 0906, Polres, Polsek
		2	13	04	2,01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah calon perangkat Desa yang difasilitasi	Orang	25	150	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	270	500.000.000	Dinas PMD	Desa	
		2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Yang Disusun	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas PMD	Desa	
		2	13	04	2,01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Pelatihan	Orang	0	12	300.000.000	9	1.020.000.000	9	100.000.000	9	300.000.000	9	150.000.000	48	1.870.000.000	Dinas PMD	Kab. Kutai Kartanegara	

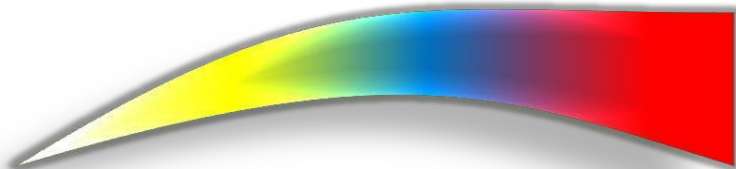


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp				Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Tim Gugus Tugas Pendamping Desa yang di Fasilitasi	Oran g	0	6		6		6		6		6		30			Kab. Kutai Kartanegara	
		2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	0	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	125	500.000.000	Dinas PMD	Desa	
		2	13	04	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Dipilih dan Dilantik	Oran g	0	270	120.000.000	252	300.000.000	90	200.000.000	28	180.000.000	0	-	640	800.000.000	Dinas PMD	Desa	
						Jumlah Anggota BPD yang Dibina dan dilatih		Oran g	0	270	252		90	28	0	640									

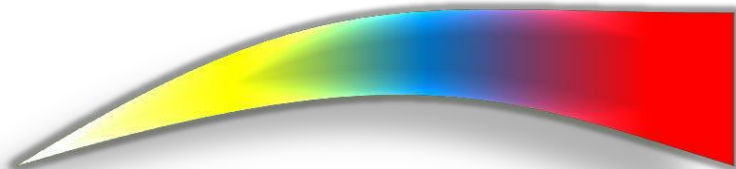


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan				
											2022		2023		2024		2025					2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	04	2,01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi	Desa	0	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	75	500.000.000	Dinas PMD	Desa	OPD yang terkait : Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pertanahan dan Tata Ruang
		2	13	04	2,01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang difasilitasi	Orang	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100	500.000.000	Dinas PMD	Desa	
		2	13	04	2,01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	1	100.000.000	0	100.000.000	1	100.000.000	0	100.000.000	1	100.000.000	3	500.000.000	Dinas PMD	Kab. Kutai Kartanegara	

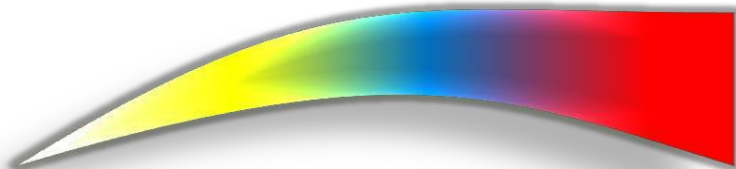


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangannya dan jumlah dokumen IDM yang disusun	Dokumen	1	2		2		2		2		2		10	1.050.000.000	Dinas PMD	Kab. Kutai Kartanegara	OPD yang terkait : Bagian Tata Pemerintahan
							Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba	Desa	0	193	193		193		193		193								
							Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Aplikasi EPDESKEL (Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan)	Orang	40	215	100.000.000	215	500.000.000	215	100.000.000	215	200.000.000	215	150.000.000	1075	Dinas PMD		Desa		
							Jumlah Peserta Rakor Perkembangan Desa	Orang	0	250		250		250		250		1250		Dinas PMD	Desa				

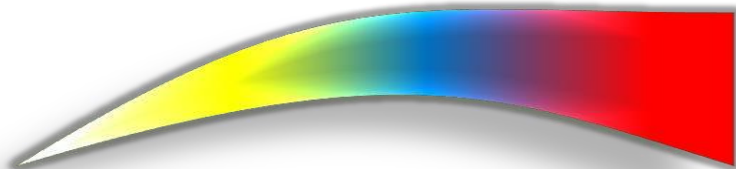


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp				Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Prosentase Posyandu Aktif	Persen	39	45,22	1.205.000.000	51,51	2.240.000.000	57,79	966.330.000	64,07	1.360.000.000	70,35	1.180.000.000	70,35	6.951.330.000	Dinas PMD		
							KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas PMD		

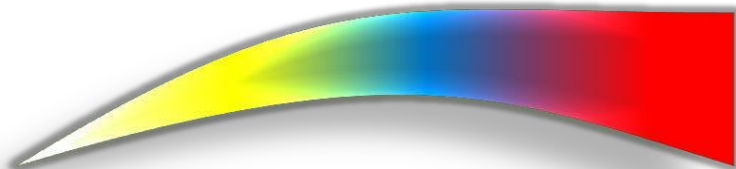


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2	13	05	2,01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	Lembaga	183	210	1.205.000.000	613	2.240.000.000	615	966.330.000	621	1.360.000.000	622	1.180.000.000	2.681	6.951.330.000			
			2	13	05	2,01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Data Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Kecamatan, Pemerintahan, Disdik, Pariwisata	Kab. Kutai Kartanegara	Lembaga oleh PMD, Pembinaan Konten oleh Disdikbud	

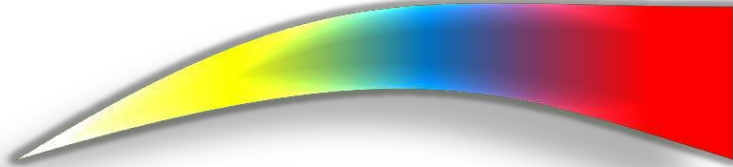


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan				
											2022		2023		2024		2025					2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Targ et	Rp	Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan Desa yang difasilitasi	Lem baga	90	60 Lem baga kem asya raka tan Desa	150.000 .000	60	300.0 00.00 0	60	146.330 .000	60	200.000 .000	60	150.00 0.000	300	946.330.000	Dinas PMD	Desa	Mendukung Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP2KB
						Jumlah Posyandu Terintegrasi yang dibentuk dan dibina		Posy andu Terin tegr asi	1	0	5		5		5		5		20		Dinas PMD		Kab. Kutai Kartanegara	Target 20 Kec (1 Kec 1 posyandu integrasi)	
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dimonev		Dok ume n	1	1	1		1		1		1		5		Dinas PMD		Desa/Kel. Kab. Kutai Kartanegara		
						Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pokjanal Posyandu		Oran g	25	0	40		40		40		40		160						
						Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba		Even t	8	3	3		3		3		3		15						

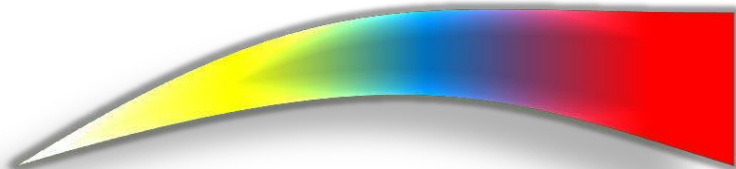


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang dilatih (RT, LPM, Karang Taruna dan Lembaga Adat)	Orang	25	30		250		250		250		250		1.030		Dinas PMD	Kab. Kutai Kartanegara	Mendukung Dinas Kesehatan, DP2KB
							Jumlah Kader Posyandu yang dibina	Orang	175 (35 Posyandu)	312 (63 posyandu)	125.000.000	300 (60 Posyandu)	500.000.000	305 (61 Posyandu)	100.000.000	310 (62 Posyandu)	200.000.000	330 (66 Posyandu)	150.000.000	1557 (312 Posyandu)	1.075.000.000	Dinas PMD	Tersebar di Kab.Kutai Kartanegara		

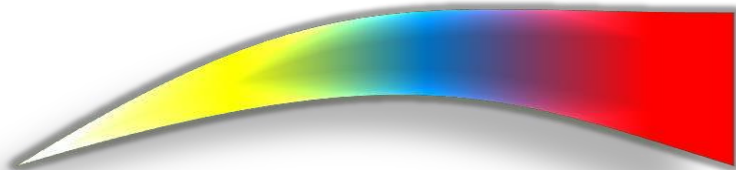


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan				
											2022		2023		2024		2025					2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	05	2,01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi Sarana dan Prasarananya	Lembaga	44	60	120.000.000	60	120.000.000	60	110.000.000	60	120.000.000	60	120.000.000	300	590.000.000	Dinas PMD	Desa	
		2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi	Desa	15	15	170.000.000	25	400.000.000	25	100.000.000	25	200.000.000	28	200.000.000	118	1.070.000.000	Dinas PMD	Desa	Dinas Pemasaran
								Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pedesaan	Orang	40	25		40		40		40		40		185		Dinas PMD	Desa	Dinas Koperasi dan UKM

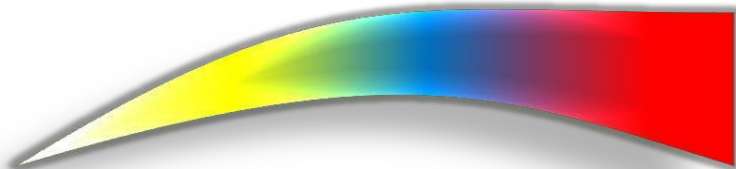


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan		
											2022		2023		2024		2025		2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp				Targ et	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan	Orang	50	25		50		50		50		50		225		Dinas PMD	Desa	Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM	
							Jumlah Pengelola Pasar Desa yang dimonev	Pengelola Pasar Desa	75	20		20		20		20		15		95		Dinas PMD	Desa		
		2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Event	3	3	120.000.000	3	120.000.000	3	100.000.000	3	120.000.000	3	110.000.000	3	570.000.000	Dinas PMD	Luar Daerah, Provinsi, Kabupaten	
							Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dikembangkan	Unit	2	2		2		2		2		2		10			Desa		
		2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Gelar Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Event	5	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	500.000.000	Dinas PMD	Luar Daerah, Provinsi, Kabupaten	

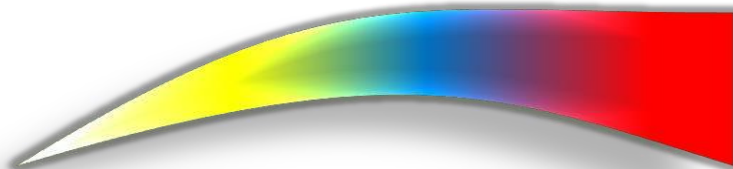


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan				
											2022		2023		2024		2025					2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2	13	05	2,01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketahanan masyarakat	Orang	50	20	75.000.000	38	100.000.000	40	110.000.000	46	120.000.000	49	100.000.000	193	505.000.000	Dinas PMD	Kab. Kutai Kartanegara	
						Jumlah Desa yang dimonev yang terkait kegiatan ketahanan masyarakat		Desa	15	0	10	10	10	10	40										
		2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan PKK Kabupaten yang difasilitasi	Kegiatan	5	5	245.000.000	5	500.000.000	5	100.000.000	5	200.000.000	5	150.000.000	5	1.195.000.000	Dinas PMD	Kab. Kutai Kartanegara	Mendukung Dinas Kesehatan

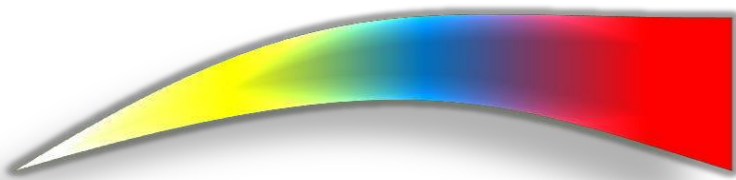


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

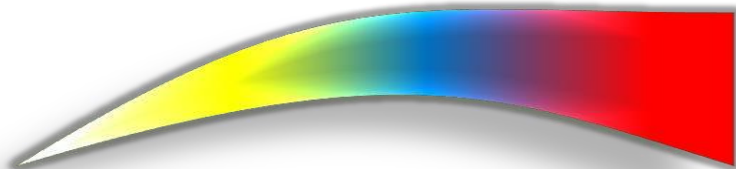
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Jumlah								26.644.687.048		28.054.616.661		23.554.616.661		28.554.616.661		23.612.116.661		130.420.653.692			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.



RENSTRA

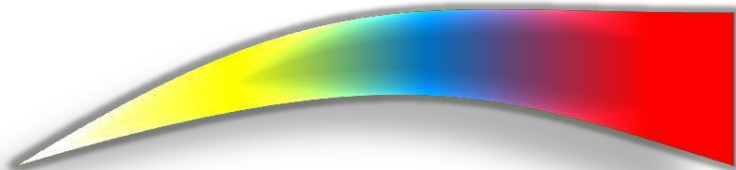
(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

Tabel 7.1
T.C-28

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 :

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	73,58	77	80	82	84	85	85
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	9	9	10	10	10	48

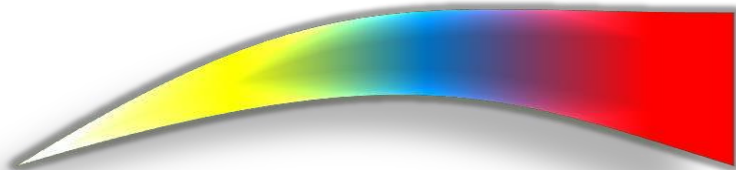


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	24	12	12	12	12	12	60
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan	107	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	13910
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/SKPD	24	12	12	12	12	12	60
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	1	1	1	1	1	5
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	3	1	1	1	1	1	5

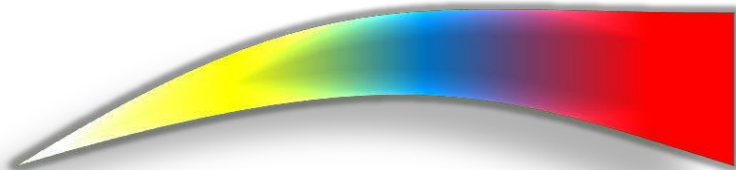


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	20	20	20	20	20	100
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10	22	50	50	50	50	222
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17	17	20	23	23	17	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	35	20	27	27	27	27	128
				Jumlah bahan Logistik Kantor	21	25	32	32	32	32	153
				Jumlah Makanan dan Minuman	889	720	720	727	727	727	3621

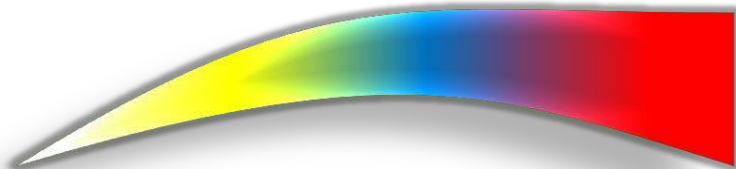


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Rapat, Tamu							
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	37.975	48.000	48.000	52.000	52.000	52.000	252000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	0	1.848	1.848	1.860	1.860	1.860	9276
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50	50	300	300	300	300	1250
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata	186	186	186	186	186	186	930

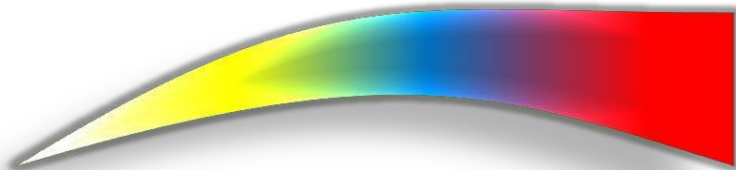


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1	1	3	3	3	3	13
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	100
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	5	15	30	30	30	30	135
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	17	20	23	23	17	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5000

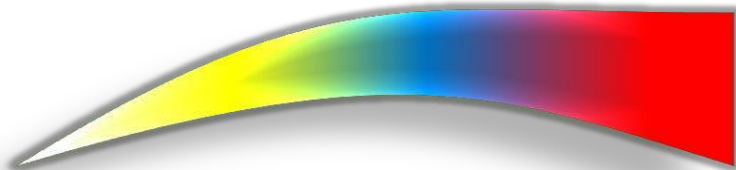


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Internet dan TV Kabel	48	24	24	24	24	24	120
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	4	10	10	10	10	44
				Jumlah sewa mobil dinas pejabat	0	0	6	6	6	6	24
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor Tenaga Pendukung Non PNS	600	46	46	46	46	46	230
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	17	20	23	23	17	100

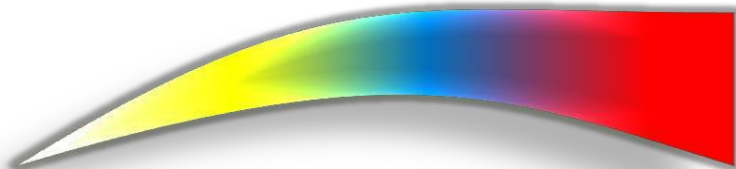


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	5	15	20	20	20	20	95
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin dan lainnya yang dipelihara	13	15	100	100	100	100	415
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	0	0	1	1	1	1	1
			PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	n.a	1,55	5,18	10,36	25,91	38,86	38,86
			Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	8	33	31	27	32	28	151

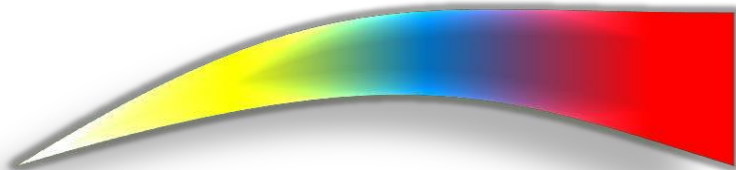


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Fasilitas Pembentukan Desa	3	6	6	3	3	1	19
			Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Kewenangan	0	10	10	10	10	10	50
				Jumlah Hasil Kajian	0	1	0	0	0	0	1
			Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0	6	3	3	3	6	21
			Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Sarana Prasarnya	5	10	10	10	15	10	55
				Jumlah Desa yang dimonev sarana dan prasarana	0	0	1	1	1	1	4
				Jumlah aplikasi Sarana Prasarana	0	0	1	0	0	0	1

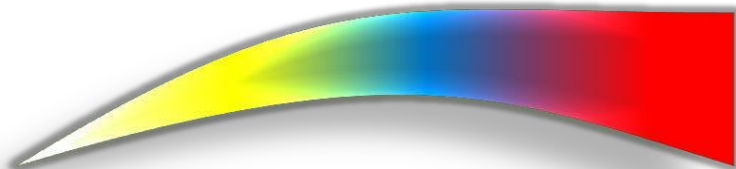


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Desa							
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	n.a	100	100	100	100	100	100
			Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	13	30	22	13	12	12	89
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Data potensi desa yang akan bekerjasama	0	1	1	1	1	1	5
				Jumlah desa yang difasilitasi untuk bekerjasama	13	16	16	8	8	8	56
				Jumlah Desa yang disosialisasikan tentang regulasi kerjasama desa	0	0	80	79	0	0	159

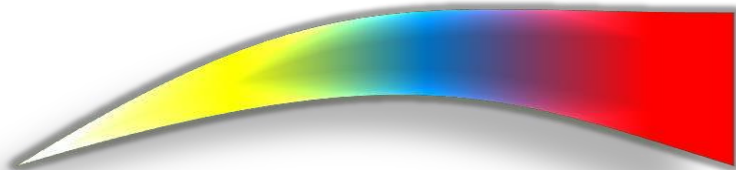


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	0	12	4	4	4	4	28
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi	2 (kawasan sudah terbentuk)	2	2	1	0	0	5
				Jumlah Data potensi per desa dan potensi unggulan desa	0	2	2	2	2	2	10
				Jumlah Kawasan yang dimonev		1	1	1	1	1	5
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	16	50	70	80	90	95	95
				Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	n.a	10	10	10	10	10	50

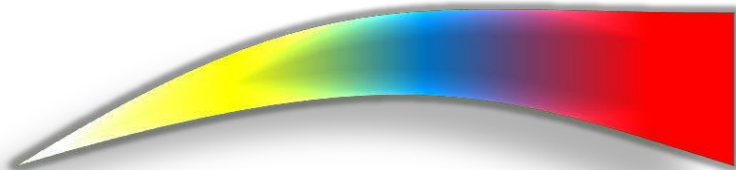


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	1.833	193	193	193	193	193	965
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan/Kasus yang difasilitasi	5	8	8	8	8	8	40
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun	8	10	5	5	5	5	30
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	28	28	28	28	28	28	140
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan	0	30	30	30	30	30	150

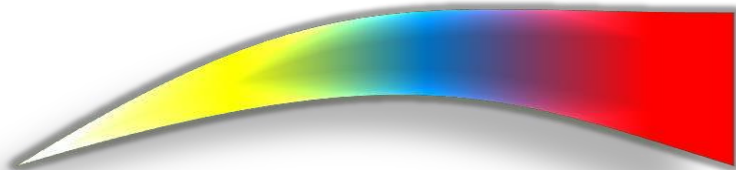


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Jumlah Desa yang dimonev	0	25	25	25	25	25	125
				Jumlah Kecamatan yang mengikuti pembekalan	0	16	16	16	16	16	80
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang difasilitasi Jaminan Sosial	1.685	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	8750
				Jumlah Kepala Desa Yang di Bimtek	0	0	86	0	107	0	193
				Jumlah Pendamping yang dilatih	0	0	237	0	0	0	237
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	0	15	15	15	15	15	75
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar	Jumlah Unit Usaha BUMDesa (Kelistrikan dan Air Bersih Desa) yang	15	13	15	13	13	14	68

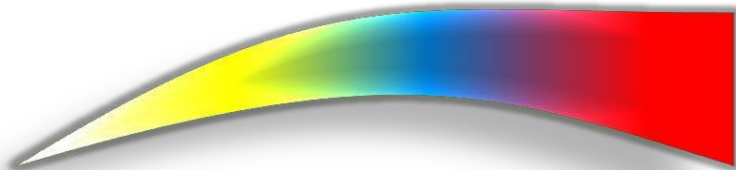


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Desa	difasilitasi							
				Jumlah Pembinaan Unit Usaha BUMDesa	0	10	10	10	10	10	50
				Jumlah yang mengikuti Pelatihan Manajemen BUMDesa	25	115	116	116	116	116	579
				Jumlah Pembentukan dan Pembinaan BUMDesa/ BUMDesma yang mengelola Pertanian	0	2	2	1	2	2	9
				Jumlah Peserta Rakor BUMDesa	0	386	386	386	386	386	1930

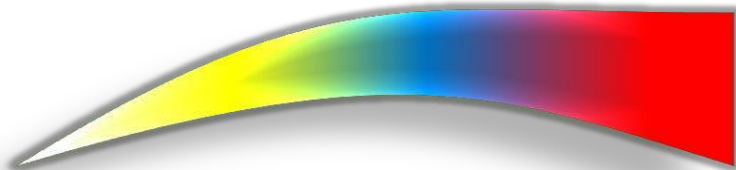


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Instansi Penerima Hibah	0	4	0	0	4	0	8
				Jumlah Kepala Desa Yang terpilih	0	86	0	0	107	0	193
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah calon perangkat Desa yang difasilitasi	25	150	30	30	30	30	270
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Yang Disusun	1	1	1	1	1	1	5
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Pelatihan	0	12	9	9	9	9	48
				Jumlah Tim Gugus Tugas Pendamping Desa yang di Fasilitasi	0	6	6	6	6	6	30
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	0	25	25	25	25	25	125

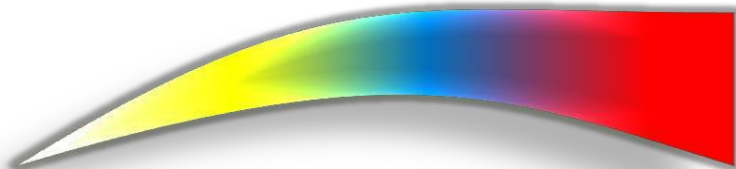


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Dipilih dan Dilantik	0	270	252	90	28	0	640
				Jumlah Anggota BPD yang Dibina dan dilatih	0	270	252	90	28	0	640
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi	0	15	15	15	15	15	75
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang difasilitasi	0	20	20	20	20	20	100
			Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen yang disusun	0	1	0	1	0	1	3

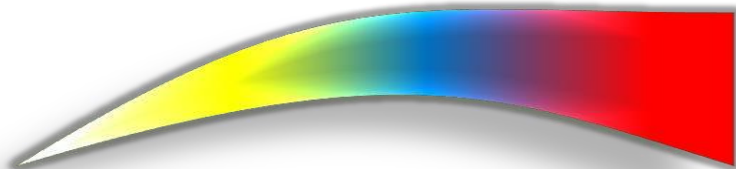


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangannya dan jumlah dokumen IDM yang disusun	1	2	2	2	2	2	10
				Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba	0	193	193	193	193	193	193
				Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Aplikasi EPDESKEL (Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan)	40	215	215	215	215	215	1075
				Jumlah Peserta Rakor Perkembangan Desa	0	250	250	250	250	250	1250
			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Prosentase Posyandu Aktif	39	45,22	51,51	57,79	64,07	70,35	70,35

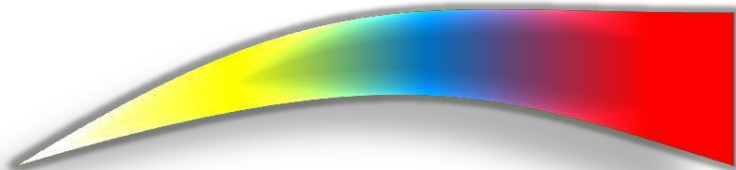


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			LEMBAGA								
			KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	183	210	613	615	621	622	2681

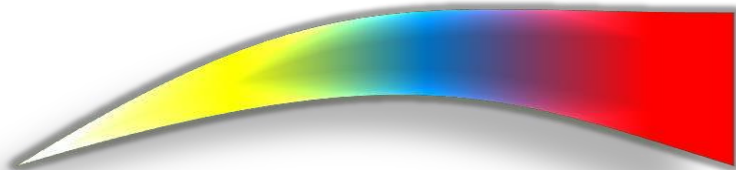


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Data Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	1	1	1	1	1	5
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan Desa yang difasilitasi	0	60 Lembaga kemasya- rakatan Desa	60	60	60	60	300
				Jumlah Posyandu Terintegrasi yang dibentuk dan dibina	0	0	5	5	5	5	20
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dimonev	1	1	1	1	1	1	5
				Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pokjnal Posyandu	0	0	40	40	40	40	160

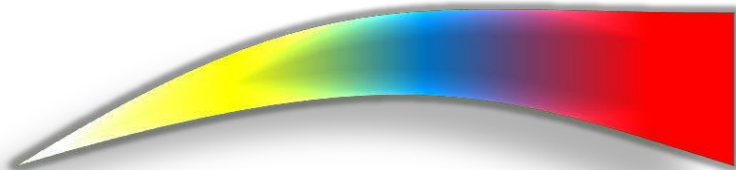


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
				Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba	0	3	3	3	3	3	15
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang dilatih (RT, LPM, Karang Taruna dan Lembaga Adat)	25	30	250	250	250	250	1030
				Jumlah Kader Posyandu yang dibina	175 (35 Posyandu)	312 (63 posyandu)	300 (60 Posyandu)	305 (61 Posyandu)	310 (62 Posyandu)	330 (66 Posyandu)	1557 (312 Posyandu)

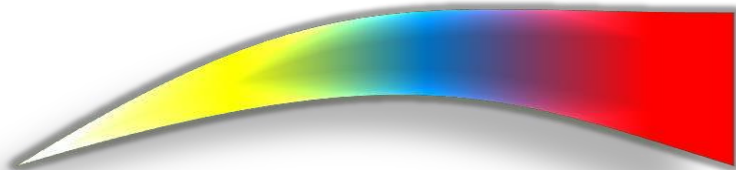


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi Sarana dan Prasarananya	44	60	60	60	60	60	300
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi	15	15	25	25	25	28	118
				Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pedesaan	40	25	40	40	40	40	185

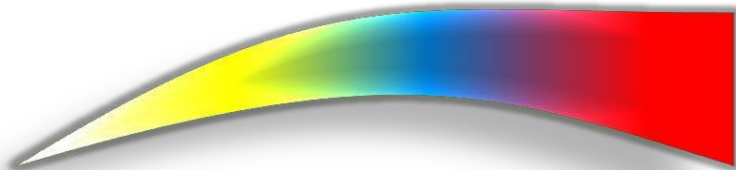


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Desa	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan	50	25	50	50	50	50	225
				Jumlah Pengelola Pasar Desa yang dimonev	0	20	20	20	20	15	95
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	3	3	3	3	3	3	3
				Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dikembangkan	0	2	2	2	2	2	10
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Gelar Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	3	3	3	3	3	3
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketahanan masyarakat	0	20	38	40	46	49	193

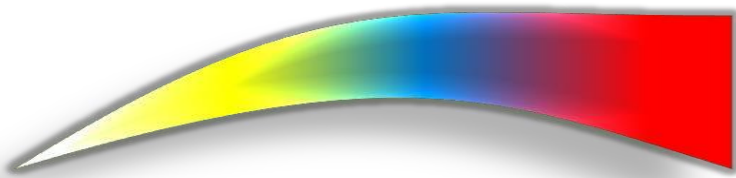


RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2022-2026

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang dimonev yang terkait kegiatan ketahanan masyarakat	0	0	10	10	10	10	40
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan PKK Kabupaten yang difasilitasi	5	5	5	5	5	5	5

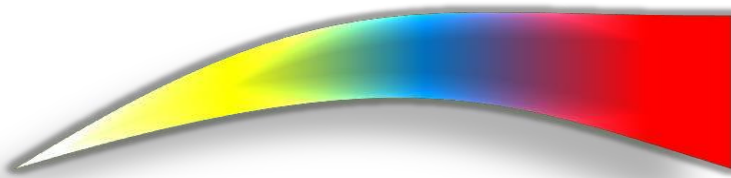


BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022—2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten Kota serta hasil analisis perkembangan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dengan mempertimbangkan capaian pada hasil penilaian Status Desa (Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal).

Dengan demikian, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Renstra menjabarkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis



Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan trans-paransi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa periode 2021-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, diharapkan perencanaan pembangunan dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tenggarong, Agustus 2021

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala



Dafip Haryanto, S. Sos, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700924 199003 1 001

**BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** Tahun 2021-2026 bertempat di Ruang Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Kantor BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri perwakilan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama disepakati bahwa diperlukan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penyesuaian indikator dan Target Kinerja Program berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Penyesuaian alokasi pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
3. Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2021-2026 sesuai hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD tahun 2021-2026.

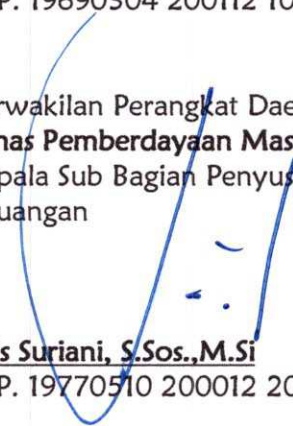
Menyetujui
Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pemerintahan


H. Fahmi, SE., M.Si
NIP. 19770128 200701 1015

Verifikator
Kasubbid Perencanaan Sosial
Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat,


Maryono, SP, M.Si
NIP. 19690304 200112 1001

Perwakilan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program &
Keuangan


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si
NIP. 19770510 200012 2005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@mail.kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id
TENGGARONG

BERITA ACARA KESEPAKATAN CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

-----Pada hari ini SENIN tanggal DUA PULUH TUJUH bulan SEPTEMBER tahun 2000 DUA PULUH SATU bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kami :

Tim Reviu :

- 1 Ketua Tim,
H. Syarifuddin, SE., MM
NIP. 19640620 199503 1 002
- 2 Anggota Tim,
Zamhari, S.Sos, M.Si
NIP. 19630422 199102 1 001

----- Selaku APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. Itda-094/531/ST-RLKEU/09/2021 Tanggal 14 September 2021 untuk melakukan reviu rancangan akhir rencana strategis 2021-2026 (RESTR) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

----- Tim reviu telah menyampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diwakili oleh pejabat yang berwenang, isi dari CHR tersebut terdapat saran yang harus ditindaklanjuti untuk kesempurnaan RESTR DPMD yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan koreksi bersama antara kedua belah pihak, dengan rincian saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada tim penyusun restra perangkat daerah agar mengeluarkan table KLHS namun sebelumnya terlebih dahulu berkoordinasi dan harmonisasi ke Bappeda
2. Disarankan kepada tim penyusun restra perangkat daerah agar memasukan table T-C23 kedalam restra perangkat daerah
3. Disarankan kepada tim penyusun restra perangkat daerah agar memasukan table T-C24 kedalam restra perangkat daerah
4. Disarankan kepada tim penyusun restra perangkat daerah agar memasukan table T-C25 kedalam restra perangkat daerah
5. Disarankan kepada tim penyusun restra perangkat daerah agar tablet-T-C27 indicator yang lengkapi data target kedalam restra perangkat daerah
6. Disarankan kepada tim penyusun restra perangkat daerah agar tablet T-C28 indicator yang lengkapi data target kedalam restra perangkat daerah
7. Disarankan kepada tim penyusun restra perangkat daerah agar table 101. indicator yang lengkapi dokumen pendukung kedalam restra perangkat daerah

8. Disarankan kepada tim penyusun restra perangkat daerah agar table 103. Keterhubungan halaman antara RPJMD dengan Restra perangkat daerah telah terisi kedalam restra perangkat daerah

----- Demikian Berita Acara Hasil Kesepakatan Catatan Hasil Reviu antara tim Reviu Inspektorat Daerah dengan pihak Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak untuk ditindaklanjuti yang hasil kesempurnaan Rencana Strategis 2021-2026 dalam bentuk PDF disampaikan kepada tim reviu. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kasubbag Program dan Keuangan,

Lilis Suryani, S.Sos., M. Si
NIP. 19770510 200012 2 005

Tim Reviu :

1 Ketua Tim,
H. Syarifuddin, SE., MM
NIP. 19640620 199503 1 002

2 Anggota Tim,
Zamhari, S.Sos, M.Si
NIP. 19630422 199102 1 001

Mengetahui :
Pengendali Teknis,

E. M. Riduan Thalha, SE
NIP. 19631130 198602 1 003

**BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**

Pada hari ini **Kamis** , tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** Tahun 2021-2026 bertempat di Ruang Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Kantor BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri perwakilan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama disepakati bahwa diperlukan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penyesuaian indikator dan Target Kinerja Program berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Penyesuaian alokasi pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
3. Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2021-2026 sesuai hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD tahun 2021-2026.

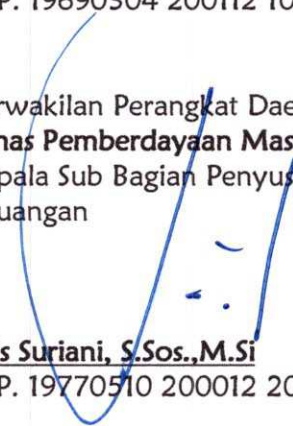
Menyetujui
Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pemerintahan


H. Fahmi, SE., M.Si
NIP. 19770128 200701 1015

Verifikator
Kasubbid Perencanaan Sosial
Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat,


Maryono, SP, M.Si
NIP. 19690304 200112 1001

Perwakilan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program &
Keuangan


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si
NIP. 19770510 200012 2005